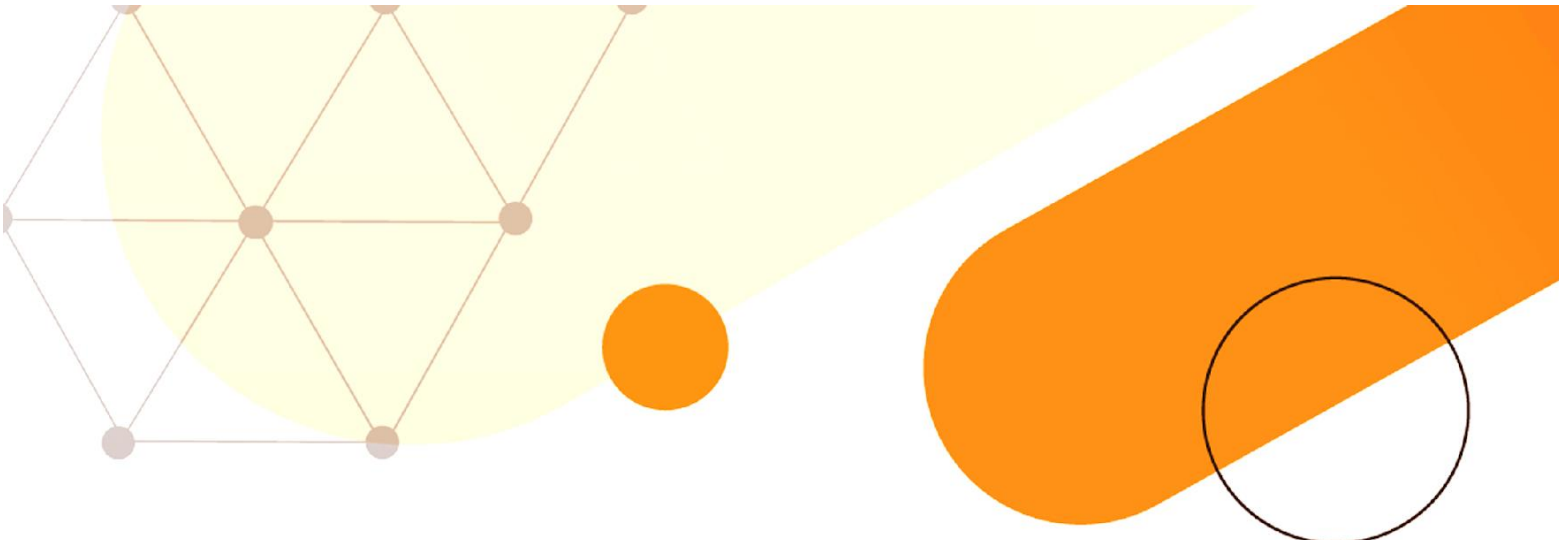




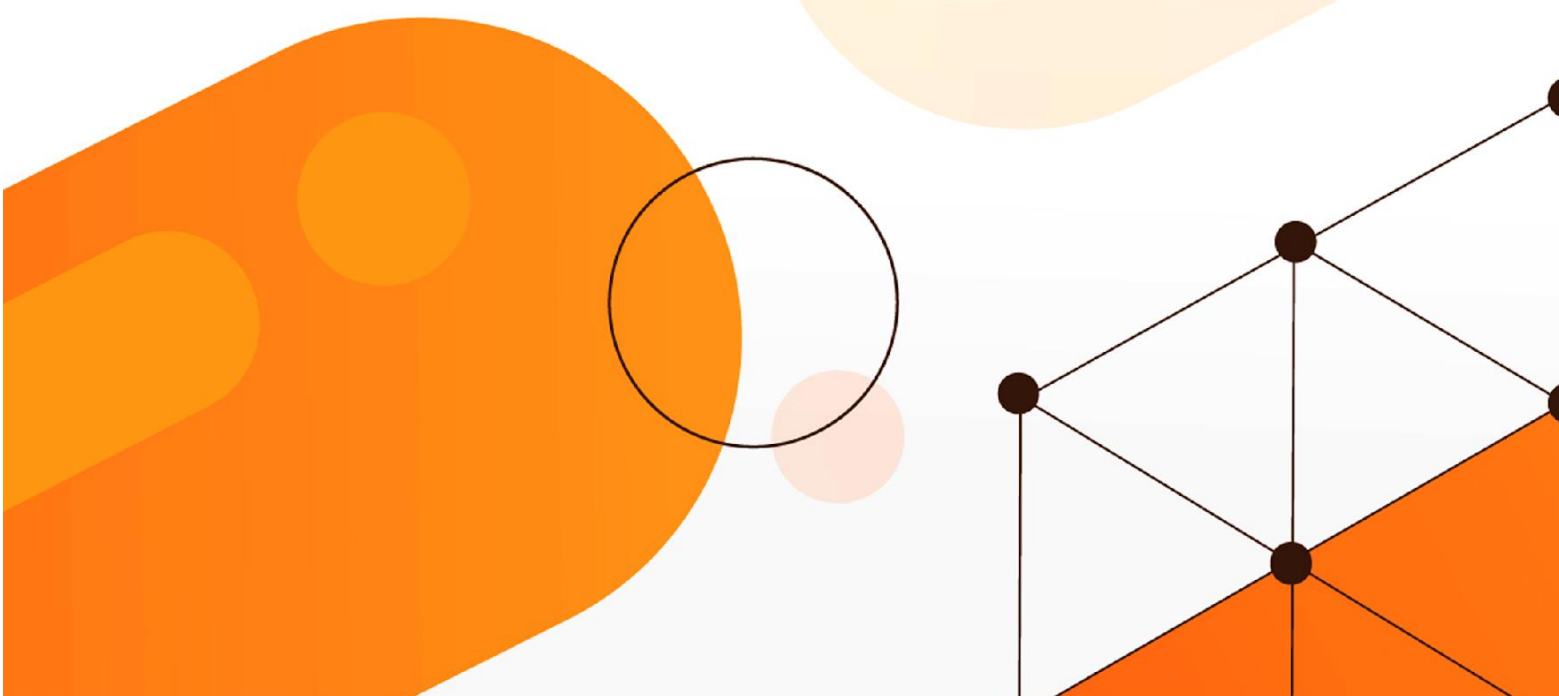
LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

2025



TINGKAT
UAKPA



BAGIAN ANGGARAN 115



**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN AUDITED
TINGKAT UAKPA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025**

SEKRETARIAT:

Jalan Turangga Nomor 25 Bandung 40264, Telepon 022-61504245, 7332604

Email: set.jabar@bawaslu.go.id. bawaslujabar@yahoo.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, 06 Mei 2026

KEPALA SEKRETARIAT



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si.,
NIP. 19701204 1990091001

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel dan Gambar	III
Daftar Lampiran	VIII
Pernyataan Tanggung Jawab	IX
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	43
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	65
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	76
F. Pengungkapan Penting Lainnya	86

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 1. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel 3. Daftar Revisi DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Barat	20
Tabel 4. Anggaran Tahun 2025 Awal dan Setelah Revisi 2024	22
Tabel 5. Perbandingan Realisasi PNBPN 2025 dan 2024	23
Tabel 6. Rincian realisasi pendapatan 2025	23
Tabel 7. Rincian Bukti penerimaan kembali belanja barang TAYL 2025	24
Tabel 8. Rincian Bukti penerimaan kembali belanja modal TAYL 2024	25
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Pendapatan 2025 dan 2024	25
Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 2025	26
Tabel 11. Realisasi belanja berdasarkan program 2025	27
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja 2025 dan 2024	28
Tabel 13. Pengembalian belanja 2025	28
Tabel 14. Rincian Pengembalian belanja 2025	28
Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2025	29
Tabel 16. Perbandingan Belanja Pegawai 2025 dan 2024	30
Tabel 17. Pengembalian Belanja Pegawai 2025	31
Tabel 18. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang 2025	32
Tabel 19. Pengembalian Belanja Barang per Akun TA 2025	32
Tabel 20. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024	33
Tabel 21. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Rupiah Murni 2025	33
Tabel 22. Perbandingan Belanja Barang Rupiah Murni TA 2025 dan TA 2024	34
Tabel 23. Pengembalian Belanja Barang Rupiah Murni 2025	36
Tabel 24. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Hibah 2025	36
Tabel 25. Perbandingan Belanja Barang Hibah TA 2025 dan 2024	37
Tabel 26. Rincian Pengembalian Belanja Barang (HDN) TA 2025	37
Tabel 27. Anggaran dan realisasi belanja modal 2025	38
Tabel 28. Perbandingan realisasi belanja modal 2025 dan 2024	38
Tabel 29. Belanja modal berdasarkan sumber anggaran 2025	39
Tabel 30. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal (RM) 2025	39

Tabel 31. Perbandingan Belanja Modal (RM) 2025 dan 2024	39
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Belanja Modal (HDN) TA 2025 dan TA 2024	40
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin (HDN) TA 2025 dan Ta 2024	40
Tabel 34. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin (HDN) TA 2025	41
Tabel 35. Perbandingan Belanja Modal Lainnya (HDN) TA 2025	42
Tabel 36. Perbandingan kas lainnya setara kas 2025 dan 2024	43
Tabel 37. Perbandingan Belanja Barang Yang Dibayar di Muka 2025 dan 2024	43
Tabel 38. Perbandingan Persediaan 2025 dan 2024	44
Tabel 39. Rincian persediaan 2024	44
Tabel 40. Mutasi nilai persediaan 2025	45
Tabel 41. Pembelian persediaan 2025 Provinsi Jawa Barat	45
Tabel 42. Habis Pakai persediaan 2025 Provinsi Jawa Barat	45
Tabel 43. Perbandingan Rincian Tanah 2025 dan 2024	46
Tabel 44. Saldo Tanah 2025	46
Tabel 45. Mutasi nilai Tanah 2025	46
Tabel 46. Perbandingan Peralatan dan Mesin 2025 dan 2024	47
Tabel 47. Mutasi nilai peralatan dan mesin 2025	47
Tabel 48. Rincian Pembelian peralatan mesin 2025 Provinsi Jawa Barat	48
Tabel 49. Rincian hibah masuk peralatan mesin 2025	49
Tabel 50. Rincian reklasifikasi masuk peralatan dan mesin 2024 Jawa Barat	49
Tabel 51. Rincian koreksi pencatatan nilai kurang peralatan dan mesin 2025 Provinsi Jawa Barat	50
Tabel 52. Rincian transfer keluar peralatan dan mesin 2025 Provinsi Jawa Barat	50
Tabel 53. Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin	50
Tabel 54. Rincian Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin Provinsi Jawa Barat	51
Tabel 55. Rincian Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin	52
Tabel 56. Rincian reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat	52
Tabel 57. Perbandingan Rincian Gedung dan Bangunan 2025 dan 2024	52

Tabel 58. Saldo Gedung dan Bangunan 2025	53
Tabel 59. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan 2025	53
Tabel 60. Perbandingan Jalan, Irigasi dan Jaringan 2025 dan 2024	54
Tabel 61. Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan 2025	54
Tabel 62. Mutasi nilai Jalan, Irigasi, Jaringan 2025	54
Tabel 63. Perbandingan aset tetap lainnya 2025 dan 2024	54
Tabel 64. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya 2025	55
Tabel 65. Perbandingan akumulasi penyusutan aset tetap per 2025 dan 2024	55
Tabel 66. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2025	56
Tabel 67. Perbandingan aset tak berwujud per 2025 dan 2024	56
Tabel 68. Rincian Aset Tak Berwujud 2025	56
Tabel 69. Perbandingan Aset Tak Berwujud 2025 dan 2024	57
Tabel 70. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud 2025	57
Tabel 71. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya 2025	58
Tabel 72. Mutasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 2025	58
Tabel 73. Perbandingan aset lain-lain TA 2025 dan TA 2024	59
Tabel 74. Rincian aset tetap yang tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintah TA 2025	59
Tabel 75. Mutasi nilai Aset Lain-Lain 2025	59
Tabel 76. Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke Aset Lain-lain	60
Tabel 77. Rincian Aset Lain - Lain yang di Hapuskan	60
Tabel 78. Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 2025 dan 2024	61
Tabel 79. Perbandingan Utang Pihak Ketiga 2025 dan 2024	61
Tabel 80. Perbandingan rincian utang kepada pihak ketiga 2025 dan 2024	61
Tabel 81. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan TA 2024	63
Tabel 82. Perbandingan rincian beban pegawai TA 2025 dan TA 2024	63
Tabel 83. Mutasi beban pegawai 2025	64
Tabel 84. Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan TA 2024	65
Tabel 85. Mutasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2025	66
Tabel 86. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024	67
Tabel 87. Mutasi Beban Barang dan Jasa TA 2025	68

Tabel 88. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar TA 2025	68
Tabel 89. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024	69
Tabel 90. Mutasi Beban Pemeliharaan TA 2025	70
Tabel 91. Perbandingan rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024	70
Tabel 92. Mutasi Beban Perjalanan Dinas TA 2025	71
Tabel 93. Perbandingan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024	72
Tabel 94. Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar TA 2025 dan TA 2024	73
Tabel 95. Perbandingan Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	74
Tabel 96. Rincian Bukti penerimaan kembali belanja barang TAYL 2025	74
Tabel 97. Rincian koreksi nilai aset non revaluasi TA 2025 Provinsi Jawa Barat	78
Tabel 98. Rincian koreksi pencatatan nilai tambah TA 2024 Provinsi Jawa Barat	78
Tabel 99. Rincian SP4HL Pengembalian Hibah TA 2025	78
Tabel 100. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2025 dan TA 2024	79
Tabel 101. Diterima dari entitas lain (DDEL) TA 2025	80
Tabel 102. Ditagihkan ke entitas lain (DKEL) TA 2025	80
Tabel 103. Transfer Keluar TA 2025	81
Tabel 104. Rekapitulasi Transfer Keluar Peralatan dan Mesin	81
Tabel 105. Rincian Barang Transfer Keluar	82
Tabel 106. Rekapitulasi Transfer Keluar Software	83
Tabel 107. Rincian Transfer Keluar Software	83
Tabel 108. Pengesahan Hibah Langsung TA 2025	84
Tabel 109. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	85
Tabel 110. Rekening Rupiah Murni Satker Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	91
Tabel 111. Pejabat Perbendaharaan TA 2025	92

Gambar 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi TA 2024

27

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Bukti Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
- Lampiran 2. Bukti Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
- Lampiran 3. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai
- Lampiran 4. Rincian Pengembalian Belanja Barang TA 2025
- Lampiran 5. Rekap Belanja Sewa Dibayar Dimuka
- Lampiran 6. Berita acara stock opname persediaan TA 2025
- Lampiran 7. Rincian Saldo Peralatan dan Mesin
- Lampiran 8. Berita Acara TKTM
- Lampiran 9. Surat Koreksi atas Gedung dan Bangunan dalam Renovasi
- Lampiran 10. BAST KTM TA 2025
- Lampiran 11. RINCIAN Belanja Pegawai YMHDB
- Lampiran 12. Belanja Barang Yang Masih Harus Di Bayar 2025
- Lampiran 13. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Di Bayar TA 2025
- Lampiran 14. Bukti Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin
- Lampiran 15. Rincian Hibah Bawaslu Langsung Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 16. Tindak Lanjut BPK dan APIP
- Lampiran 17. Laporan Akhir PIPK 2025
- Lampiran 18. Laporan Capaian Output



Jalan Turangga Nomor 25 Bandung 40264

Telepon 022-61504245/7332604

Laman: www.bawaslu-jabarprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Wilayah Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 06 Mei 2026

KEPALA SEKRETRIAT



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si.
NIP. 19701204 1990091001

Ringkasan

Laporan Keuangan Wilayah Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp706.457.364,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp123.729.482.936,00 atau mencapai 95,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp130.222.800.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas periode Tahun 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.868.868.797,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp821.944.660,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp16.046.924.137,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2025 masing-masing sebesar Rp37.490.613,00 dan Rp16.831.378.184,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit - LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan - LO per 31

Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp126.858.337.045,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp126.858.337.045,00. Pendapatan Pelepasan Aset sebesar Rp367.816.000,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp0,00. Kegiatan Non Operasional lainnya surplus sebesar Rp210.839.908,00 dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp126.279.681.137,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas per tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp160.833.797.276,00 dikurangi Defisit - LO sebesar Rp126.279.681.137,00 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp90.472.256.473,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp72.749.518.518,00 sehingga nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.743.831.378.184,00 apabila dibandingkan dengan posisi awal tahun 2025 mengalami penurunan Ekuitas sebesar Rp144.002.419.092,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31-Dec-25		% thd Angg	31-Dec-24
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0,00	706.457.364,00	0,00	374.465.327,00
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0,00	706.457.364,00	0,00	374.465.327,00
B. BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pemerintah Pusat					
Belanja Pegawai	B.3	54.068.004.000,00	50.946.470.930,00	94,23	33.161.621.843,00
Belanja Barang	B.4	74.722.990.000,00	71.391.177.397,00	95,54	891.272.937.612,00
Belanja Modal	B.5	1.431.806.000,00	1.391.834.609,00	97,21	12.934.284.636,00
Jumlah Belanja Pemerintah Pusat		130.222.800.000,00	123.729.482.936,00	95,01	937.368.844.091,00

II. Neraca

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	0,00	139.672.325.419,00
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.2	813.225.160,00	1.638.566.333,00
Persediaan	C.3	8.719.500,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		821.944.660,00	141.310.891.752,00
ASET TETAP			
Tanah	C.4	1.623.808.582,00	1.583.857.000,00
Peralatan dan Mesin	C.5	28.005.143.163,00	29.651.516.020,00
Gedung dan Bangunan	C.6	255.930.000,00	255.930.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	9.375.000,00	9.375.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.8	4.174.420.937,00	4.213.547.418,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(18.021.753.545,00)	-
Jumlah Aset Tetap		16.046.924.137,00	19.547.244.489,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.10	0,00	322.700.642,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.11	0,00	2.781.881.744,00
Aset Lain-lain	C.12	455.178.282,00	436.605.500,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(445.178.282,00)	-
Jumlah Aset Lainnya		0,00	2.781.881.744,00
JUMLAH ASET		16.868.868.797,00	163.640.017.985,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	37.490.613,00	2.806.220.709,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		37.490.613,00	2.806.220.709,00
JUMLAH KEWAJIBAN		37.490.613,00	2.806.220.709,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	16.831.378.184,00	160.833.797.276,00
JUMLAH EKUITAS	C.15	16.831.378.184,00	160.833.797.276,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		16.868.868.797,00	163.640.017.985,00

III. Laporan Operasional

**BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	31-Dec-25	31-Dec-24
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0,00	27.841.023,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	27.841.023,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	50.959.768.834,00	33.161.621.843,00
Beban Persediaan	D.3	15.852.525,00	21.309.181.007,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	42.301.187.377,00	593.110.383.292,00
Beban Pemeliharaan	D.5	2.396.357.015,00	5.119.516.598,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	27.494.880.922,00	294.862.180.033,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	3.690.290.372,00	3.678.090.584,00
JUMLAH BEBAN		126.858.337.045,00	951.240.973.357,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.8	126.858.337.045,00	(951.213.132.334,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	367.816.000,00	144.142.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0,00	108.300.000,00
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		367.816.000,00	35.842.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	212.014.883,00	2.140.000.102,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	1.174.975,00	
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		210.839.908,00	2.140.000.102,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		578.655.908,00	2.175.842.102,00

URAIAN	Ref	31-Dec-25	31-Dec-24
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.13	(126.279.681.137,00)	(949.037.290.232,00)
POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	D.13	(126.279.681.137,00)	(949.037.290.232,00)

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	31-Dec-25	31-Dec-24
EKUITAS AWAL	E.1	160.833.797.276,00	249.081.335.774,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(126.279.681.137,00)	(949.037.290.232,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	(90.472.256.473,00)	(11.579.766,00)
Koreksi Atas Reklasifikasi			0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4	(16.084.967,00)	(11.579.766,00)
Koreksi Lain-Lain	E.5	(90.456.171.506,00)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	72.749.518.518,00	860.801.331.500,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(144.002.419.092,00)	(88.247.538.498,00)
EKUITAS AKHIR	E.8	16.831.378.184,00	160.833.797.276,00

V. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Dasar Hukum dan Profil Entitas

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa

Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 /PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 /PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- n. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2022 tentang pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- o. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 439/Pl.09/K1/12/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- p. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Kementrian/Lembaga Tahun 2025 (*Unaudited*);

- q. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-148/KU.02/SJ/01/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- r. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 November 2024.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan

Bawaslu Provinsi; dan

- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun wewenang Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat antara lain:

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat masuk kedalam kategori Bawaslu Provinsi Kelas A, yakni dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 4 (empat) Kepala Bagian, yaitu :

- a) Kepala Bagian Administrasi;
- b) Kepala Pengawasan;
- c) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses; dan
- d) Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data. Pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software/Aplikasi</i> Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dalam periode Tahun Anggaran 2025 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan beberapa kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Revisi DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Barat

DIPA	PAGU	TANGGAL DIPA
DIPA AWAL	99.182.396.000,00	2 Desember 2024
REVISI 01	46.598.226.000,00	21 Februari 2025
REVISI 02	114.141.848.000,00	21 April 2025
REVISI 03	129.260.384.000,00	10 Juli 2025
REVISI 04	130.696.103.000,00	3 Oktober 2025
REVISI 05	144.735.514.000,00	3 November 2025
REVISI 06	129.480.800.000,00	19 November 2025
REVISI 07	129.480.800.000,00	12 Desember 2025
REVISI 08	130.222.800.000,00	29 Desember 2025

Adapun rincian penjelasan revisi DIPA Tahun 2025 Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- **REVISI 01** merupakan Revisi tingkat DJA atas tindaklanjut surat Instruksi Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- **REVISI 02** merupakan Revisi tingkat Kanwil atas pencantuman anggaran Hibah Pemilhan Tahun Anggaran 2025 ke dalam DIPA;
- **REVISI 03** merupakan Revisi tingkat DJA atas Pemenuhan Belanja Operasional dan Non Operasional serta Penyesuaian terhadap Pagu Blokir;
- **REVISI 04** merupakan Revisi tingkat DJA atas Pecah DIPA Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut dan Kota Bekasi;

- REVISI 05 merupakan Revisi tingkat DJA atas Pemenuhan belanja Operasional dan Penyesuaian terhadap Pagu Blokir;
- REVISI 06 merupakan Revisi tingkat Kanwil atas pencantuman Hibah kedalam DIPA;
- REVISI 07 merupakan Revisi tingkat KPA atas pemutakhiran revisi POK dan Revisi administrasi;
- REVISI 08 merupakan Revisi tingkat Kanwil atas Pengurangan Pagu Hibah.

Perubahan berdasarkan jenis belanja revisi anggaran awal dan setelah revisi DIPA terakhir pada periode pelaporan antara lain:

Tabel 4. Anggaran Tahun 2025 Awal dan Setelah Revisi 2025

Uraian	2025	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan:		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00
Total Pendapatan	0,00	0,00
Total Estimasi Pendapatan	0,00	0,00
Belanja:		
Belanja Pegawai	34.794.453.000,00	54.068.004.000,00
Belanja Barang	45.050.664.000,00	23.123.888.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Total Belanja	79.845.117.000,00	77.191.892.000,00
Pinjaman dan Hibah:		
Belanja Barang	0,00	51.599.102.000,00
Belanja Modal	0,00	1.431.806.000,00
Total Pinjaman dan Hibah	0,00	53.030.908.000,00
Total Anggaran Belanja	79.845.117.000,00	130.222.800.000,00

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan
Rp706.457.364,00

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp706.457.364,00 dan Rp374.465.327,00.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi PNBP 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	706.457.364,00	374.465.327,00	88,66
Jumlah	706.457.364,00	374.465.327,00	88,66

PNBP periode Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 88.66 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian realisasi pendapatan 2025

Akun	Uraian	TA 2025		%
		Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	367.816.000,00	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	204.270.273,00	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	134.371.091,00	0,00
Total		0,00	706.457.364,00	0,00

B.1.1 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Pendapatan Penjualan
Peralatan dan Mesin
Rp367.816.000,00

Realisasi pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp367.816.000,00 merupakan pendapatan penjualan lelang yang terdiri atas:

1. Barang Milik Negara berupa barang bergerak pada Satker Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Risalah Lelang Nomor 705/08.01/2025-01 sebesar Rp367.816.000,00. Pendapatan hasil Lelang telah disetorkan pada kas negara dengan NTPN 30A052G503GS050I tanggal 13 November 2025 sebagaimana bukti terlampir pada Lampiran I Bukti Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin.

B.1.2 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

Pendapatan
Penerimaan Kembali
Belanja Barang TAYL
Rp204.270.273,00

Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu per 31 Desember 2025 sebesar Rp204.270.273,00 merupakan penerimaan pengembalian belanja hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Bukti penerimaan kembali belanja barang TAYL 2025

No	Tanggal	NTPN	Jumlah (Rp)
1	04/02/2025	081D60NA0DGVQBEF	2.643.468,00
2	10/02/2025	4C7F848VVNQO3VGH	60.000,00
3	10/02/2025	43CC755DFID4KOKP	12.035.297,00
4	12/02/2025	BA40F55DFID6OJ06	25.000,00
5	12/02/2025	F520D0NA0DH8NKR6	1.000,00
6	12/02/2025	987946U8F7HVIJHG	73.500,00
7	12/02/2025	0A9872G502M1HK8U	10.000,00
8	21/04/2025	0E7110NA0DNCEMB8	25.000.000,00
9	15/07/2025	88ED31JNG8IJLNLQ	267.000,00
10	30/07/2025	CB1992G5035FUET2	6.466.619,00
11	30/07/2025	3E4312G5035FUDFV	11.193.185,00
12	30/07/2025	57D0A48VVOA8ODEJ	14.002.661,00
13	20/11/2025	F00388N3ETHP6LTL	6.956.500,00
14	19/11/2025	7CEED8N3ETHP6JRD	5.593.009,00
15	13/12/2025	D0B820NA0EF2H39B	116.943.034,00
16	19/12/2025	E22780NA0EF84N9S	3.000.000,00
Total			204.270.273,00

Bukti penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu disajikan pada Lampiran II. **Bukti Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.**

B.1.3 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

Pendapatan
Penerimaan Kembali
Belanja Modal TAYL
Rp134.371.091,00

Penerimaan Kembali belanja modal TAYL per 31 Desember 2025 sebesar Rp134.371.091,00 merupakan penerimaan atas hasil pemeriksaan BPK atas Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Gedung Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL

No	Tanggal	NTPN	Jumlah (Rp)
1	07-Feb-25	5788955DFICTRAI8	126.626.418,00
2	11-Feb-25	314810NA0DH7LU1D	7.744.610,00
Total			134.371.028,00

1. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp126.626.418,00 merupakan pengembalian atas kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024;
2. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp7.744.610,00 merupakan pengembalian atas Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik pada Bawaslu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 88,66 persen disebabkan oleh:

1. Pendapatan dari Penjualan Lelang Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 lebih besar dari tahun 2024;
2. Terdapat Pendapatan yang berasal dari Pengembalian Belanja Modal 2024.

Perbandingan realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Pendapatan 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	367.816.000,00	144.142.000,00	155,18
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	685.730,00	(100,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	27.833.495,00	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	204.270.273,00	201.804.102,00	1,22
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	134.371.091,00	0,00	0,00

Total Pendapatan Kotor	706.457.364,00	374.465.327,00	88,66
Pengembalian Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Total	706.457.364,00	374.465.327,00	88,66

B.2 Realisasi Belanja

Realisasi Belanja
Rp123.729.482.936,00

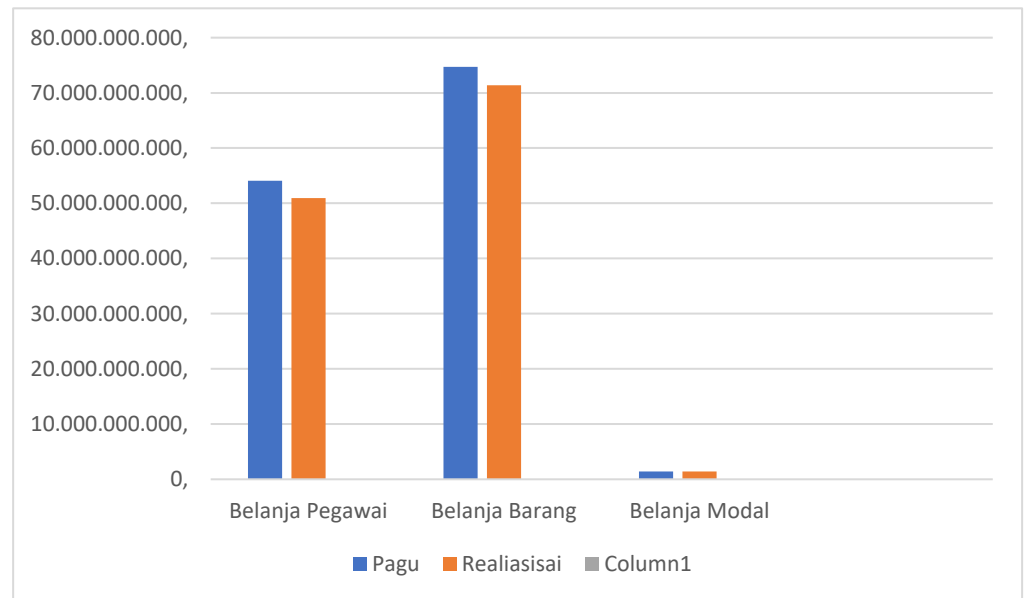
Realisasi Belanja pada periode Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp123.729.482.936,00 atau 95,00 persen dari anggaran belanja sebesar Rp130.222.800,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	54.068.004.000,00	50.955.301.078,00	94,24
Belanja Barang	74.722.990.000,00	71.496.623.144,00	95,68
Belanja Modal	1.431.806.000,00	1.391.834.609,00	97,21
Total Belanja Kotor	130.222.800.000,00	123.843.758.831,00	95,10
Pengembalian Belanja	0,00	114.275.895,00	0,00
Total	130.222.800.000,00	123.729.482.936,00	95,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi periode TA 2025 UAKPA



Realisasi belanja berdasarkan program periode TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi belanja berdasarkan program 2025

Program	TA 2025		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
Rupiah Murni	1.579.102.000,00	1.514.652.347,00	95,92
Hibah Langsung Dalam Negeri	49.938.938.000,00	49.135.122.561,00	98,39
Program Dukungan Manajemen			
Rupiah Murni	75.612.790.000,00	70.061.184.046,00	92,66
Hibah Langsung Dalam Negeri	3.091.970.000,00	3.018.523.982,00	97,62
Total	130.222.800.000,00	937.368.844.091,00	95,00

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya Tahapan Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan pada awal Tahun dan Pemilihan Kepala daerah serentak pada akhir Tahun 2025.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	
I. Rupiah Murni	71.609.080.936,00	468.043.281.243,00	(84,70)
Belanja Pegawai	50.955.301.078,00	33.161.993.846,00	53,66
Belanja Barang	20.653.779.858,00	421.946.502.761,00	(95,11)
Belanja Modal	-	12.934.784.636,00	(100,00)
II. Hibah Dalam Negeri	52.234.677.895,00	470.916.322.723,00	(88,91)
Belanja Barang	50.842.843.286,00	470.916.322.723,00	(89,20)
Belanja Modal	1.391.834.609,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	123.843.758.831,00	938.959.603.966,00	(86,81)
Pengembalian Belanja	114.275.895,00	1.590.759.875,00	(92,82)
Total	123.729.482.936,00	937.368.844.091,00	(86,80)

Rekapitulasi Belanja Negara sebesar Rp123.729.482.936,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Bruto sebesar Rp123.843.758.831,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp114.275.895,00.

Pengembalian belanja sebesar Rp114.275.895,00 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang terdiri dari:

Tabel 13. Pengembalian belanja 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Pegawai	8.830.148,00
2.	Belanja Barang	105.445.747,00
3.	Belanja Modal	0,00
Jumlah		114.275.895,00

Rincian pengembalian belanja sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian pengembalian belanja 2025

No	Akun	Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai			
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5.310.464,00
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.152,00
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	597.680,00
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	119.536,00
5	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	360.000,00
6	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	217.260,00
7	511129	Belanja Uang Makan PNS	210.000,00
8	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1.295.756,00

9	511628	Belanja Uang Makan PPPK	70.300,00
10	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	648.000,00
Jumlah			8.830.148,00
Belanja Barang			
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17.413.702,00
2	522191	Belanja Jasa Lainnya	1.743.240,00
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.580.000,00
4	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.208.213,00
5	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	469.240,00
6	521211	Belanja Bahan	34.741.902,00
7	522191	Belanja Jasa Lainnya	40.000.000,00
8	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.089.450,00
9	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.200.000,00
Jumlah			105.445.747,00
Total			114.275.895,00

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp50.946.470.930,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp50.946.470.930,00 atau 94,24 persen dari anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp54.068.004.000,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.266.896.000,00	5.503.646.990,00	87,82
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	17.169.428.000,00	17.159.404.395,00	99,94
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	13.833.050.000,00	13.575.333.698,00	98,14
Belanja Lembur	2.661.750.000,00	907.072.000,00	34,08
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	14.136.880.000,00	13.809.843.995,00	97,69
Jumlah Belanja Kotor	54.068.004.000,00	50.955.301.078,00	94,24
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	8.830.148,00	0,00
Total	54.068.004.000,00	50.946.470.930,00	94,23

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp50.946.470.930,00 dan Rp33.161.621.843,00 atau mengalami kenaikan sebesar 49,43 persen. Kenaikan belanja pegawai disebabkan antara lain:

1. Penambahan jumlah pegawai berasal dari perekrutan CPNS umum Tahun 2024;
2. Adanya Penambahan Pembayaran Tunjangan Struktural dan Tunjangan Fungsional pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Adanya Penambahan Pembayaran Pembayaran Belanja Gaji PPPK di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

Adapun perbandingan belanja pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Belanja Pegawai 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.503.646.990,00	3.076.140.245,00	78,91
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	17.159.404.395,00	17.338.670.400,00	-1,03
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	13.575.333.698,00	5.458.498.609,00	148,70
Belanja Lembur	907.072.000,00	574.048.000,00	58,01
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	13.809.843.995,00	6.714.636.592,00	105,67
Jumlah Belanja Kotor	50.955.301.078,00	33.161.993.846,00	53,66
Pengembalian Belanja Pegawai	8.830.148,00	372.003,00	2.273,68
Total	50.946.470.930,00	33.161.621.843,00	53,63

Realisasi Belanja Pegawai 2025 sebesar Rp50.946.470.930,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji PNS, CPNS dan PPPK Bulan Januari s.d Desember 2025;
2. Pembayaran tunjangan struktural dan fungsional Bulan Januari s.d Desember 2025;
3. Pembayaran uang makan PNS dan PPPK Bulan Januari s.d Desember 2025;
4. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur Bulan Januari s.d Desember 2025;

5. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Bulan Januari s.d Desember 2025;
6. Pembayaran tunjangan kinerja PNS dan PPPK Bulan Januari s.d Desember 2025;
7. Pembayaran THR PNS dan PPPK tahun 2025;
8. Pembayaran Gaji ke-13 PNS dan PPK tahun 2025
9. Pembayaran THR dan Gaji ke-13 Uang Kehormatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2025.

Sementara terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp8.830.148,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Pengembalian Belanja Pegawai 2025

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5.310.464,00
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.152,00
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	597.680,00
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	119.536,00
5	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	360.000,00
6	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	217.260,00
7	511129	Belanja Uang Makan PNS	210.000,00
8	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1.295.756,00
9	511628	Belanja Uang Makan PPPK	70.300,00
10	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	648.000,00
Jumlah			8.830.148,00

Rincian NTPN dan nomor SP2D Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp8.830.148,00 disajikan pada **Lampiran III Rincian Pengembalian Belanja Pegawai**.

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp71.391.177.397,00*

Realisasi Belanja Barang periode Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp71.391.177.397,00 atau 95,54 persen dari pagu anggaran belanja barang sebesar Rp74.722.990.000,00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang periode 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	9.063.604.000,00	8.447.034.424,00	93,20
Belanja Barang Non Operasional	23.677.755.000,00	23.457.867.255,00	99,07
Belanja Persediaan	26.640.000,00	25.747.000,00	96,65
Belanja Jasa	10.742.893.000,00	9.663.189.625,00	89,95
Belanja Pemeliharaan	3.013.185.000,00	2.397.937.015,00	79,58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	28.198.913.000,00	27.504.847.825,00	97,54
Jumlah Belanja Kotor	74.722.990.000,00	71.496.623.144,00	95,68
Pengembalian Belanja Barang	0,00	105.445.747,00	0,00
Total	74.722.990.000,00	71.391.177.397,00	95,54

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp71.391.177.397,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Barang Bruto sebesar Rp71.496.623.144,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp105.445.747,00. Pengembalian belanja barang sebesar Rp105.445.747,00 terdiri atas akun sebagai berikut:

Tabel 19. Pengembalian Belanja Barang Per Akun TA 2025

No	Kode Akun	Uraian	Jumlah (Rp)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17.413.702,00
2	521211	Belanja Bahan	34.741.902,00
3	522191	Belanja Jasa Lainnya	41.743.240,00
4	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.580.000,00
5	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.297.663,00
6	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.200.000,00
7	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	469.240,00
Total			105.445.747,00

Adapun rincian pengembalian Belanja Barang beserta NTPN nya tersaji pada **Lampiran IV Rincian Pengembalian Belanja Barang TA 2025**.

Realisasi Belanja Barang periode 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp71.391.177.397,00 dan Rp891.272.937.612,00. Realisasi Belanja Barang 2025 mengalami penurunan sebesar 91,99 persen dari Realisasi Belanja Barang 2024 hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sedangkan pada Tahun 2025 tidak terdapat Tahapan Pemilihan Umum.

Tabel 20. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	TA 2025	TA 2024 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	8.447.034.424,00	19.494.168.766,00	(56,67)
Belanja Barang Non Operasional	23.457.867.255,00	491.536.925.000,00	(95,23)
Belanja Persediaan	25.747.000,00	18.567.525,00	38,67
Belanja Jasa	9.663.189.625,00	81.189.203.219,00	(88,10)
Belanja Pemeliharaan	2.397.937.015,00	5.119.516.598,00	(53,16)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.504.847.825,00	295.504.444.376,00	(90,69)
Jumlah Belanja Kotor	71.496.623.144,00	892.862.825.484,00	(91,99)
Pengembalian Belanja Barang	105.445.747,00	1.589.887.872,00	(93,37)
Total	71.391.177.397,00	891.272.937.612,00	(91,99)

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 sebesar RP71.391.177.397,00 merupakan realisasi belanja barang yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar RP20.629.365.463,00 dan Hibah Dalam Negeri sebesar Rp50.761.811.934,00

B.4.1 Belanja Barang (Rupiah Murni)

Belanja Barang (RM)
Rp20.629.365.463,00

Realisasi Belanja Barang (Rupiah Murni) periode Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.629.365.463,00 atau 89,21 persen dari pagu anggaran belanja barang (Rupiah Murni) sebesar Rp23.123.888.000,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang (Rupiah Murni) periode 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Rupiah Murni 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	8.703.233.000,00	8.114.791.957,00	93,24
Belanja Barang Non Operasional	749.166.000,00	668.746.850,00	89,27
Belanja Persediaan	26.640.000,00	25.747.000,00	96,65
Belanja Jasa	4.819.595.000,00	3.848.717.592,00	79,86
Belanja Pemeliharaan	2.739.033.000,00	2.175.652.424,00	79,43
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.086.221.000,00	5.820.124.035,00	95,63
Jumlah Belanja Kotor	23.123.888.000,00	20.653.779.858,00	89,32
Pengembalian Belanja Barang	0,00	24.414.395,00	0,00
Total	23.123.888.000,00	20.629.365.463,00	89,21

Realisasi Belanja Barang (Rupiah Murni) pada periode TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.629.365.463,00 dan

Rp420.356.614.889,00 realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 95,09 persen dari Realisasi Belanja Barang (RM) 31 Desember 2024, Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Perbandingan Belanja Barang Rupiah Murni 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	8.114.791.957,00	18.021.939.642,00	-54,97
Belanja Barang Non Operasional	668.746.850,00	222.388.131.353,00	-99,70
Belanja Persediaan	25.747.000,00	18.567.525,00	38,67
Belanja Jasa	3.848.717.592,00	36.132.655.789,00	-89,35
Belanja Pemeliharaan	2.175.652.424,00	4.645.343.364,00	-53,16
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.820.124.035,00	140.739.865.088,00	-95,86
Jumlah Belanja Kotor	20.653.779.858,00	421.946.502.761,00	-95,11
Pengembalian Belanja Barang	24.414.395,00	1.589.887.872,00	-98,46
Total	20.629.365.463,00	420.356.614.889,00	-95,09

Realisasi Belanja Barang (Rupiah Murni) sebesar Rp20.629.365.463,00 dipergunakan untuk:

1. Pembinaan/Pelaksanaan penanganan dan penidakan pelanggaran (Provinsi)
2. Pembinaan/Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)
3. Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)
4. Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab/Kota)
5. Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan (Provinsi)
6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
7. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas
8. Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota
9. Evaluasi pelaksanaan pengawasan Kabupaten?kota
10. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas Bawaslu Kabupaten/Kota
11. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif
12. Pengawasan Pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)
13. Pengawasan Pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)
14. Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi

15. Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota
16. Pengelolaan Kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi
17. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota
18. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi
19. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota
20. Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi
21. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
22. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi
23. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota
24. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi
25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota
26. Pembinaan dan Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi
27. Pembinaan dan Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota
28. Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi
29. Diseminasi Produk Hukum di Bawaslu Provinsi
30. Kajian hukum di Bawaslu Provinsi
31. Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
32. Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
33. Fasilitasi oembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi
34. Fasilitasi oembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota
35. Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi
36. Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi
37. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Provinsi
38. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota

Belanja Barang (RM) sebesar Rp20.629.365.463,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Barang (RM) Bruto sebesar Rp220.653.779.858,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp24.414.395,00. Pengembalian belanja barang sebesar Rp24.414.395,00 terdiri atas akun sebagai berikut:

Tabel 23. Pengembalian Belanja Barang Rupiah Murni 2025

No	Kode Akun	Uraian	Jumlah (Rp)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17.413.702,00
2	522191	Belanja Jasa Lainnya	1.743.240,00
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.580.000,00
4	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.208.213,00
5	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	469.240,00
Total			24.414.395,00

B.4.2 Belanja Barang (HDN)

Belanja Barang
(Hibah)
Rp50.761.811.934,00

Realisasi belanja barang (HDN) periode Tahun Anggaran 2025 Rp50.761.811.934,00 atau 99,20 persen dari pagu anggaran belanja barang (HDN) sebesar Rp51.171.133.790,00 Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang (HDN) periode TA 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Hibah 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	360.371.000,00	332.242.467,00	92,19
Belanja Barang Non Operasional	22.928.589.000,00	22.789.120.405,00	99,39
Belanja Jasa	5.923.298.000,00	5.814.472.033,00	98,16
Belanja Pemeliharaan	274.152.000,00	222.284.591,00	81,08
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	21.684.723.790,00	21.684.723.790,00	100,00
Jumlah Belanja Kotor	51.171.133.790,00	50.842.843.286,00	99,36
Pengembalian Belanja Barang	0,00	81.031.352,00	0,00
Total	51.171.133.790,00	50.761.811.934,00	99,20

Realisasi Belanja Barang (HDN) pada periode TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp470.916.322.723,00 dan Rp866.316.068,00.

Tabel 25. Perbandingan Belanja Barang Hibah 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	332.242.467,00	1.472.229.124,00	(77,43)
Belanja Barang Non Operasional	22.789.120.405,00	269.148.793.647,00	(91,53)
Belanja Jasa	5.814.472.033,00	45.056.547.430,00	(87,10)
Belanja Pemeliharaan	222.284.591,00	474.173.234,00	(53,12)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	21.684.723.790,00	154.764.579.288,00	(85,99)
Jumlah Belanja Kotor	50.842.843.286,00	470.916.322.723,00	(89,20)
Pengembalian Belanja Barang	81.031.352,00	0,00	0,00
Total	50.761.811.934,00	470.916.322.723,00	(89,22)

Realisasi Belanja Barang (HDN) sebesar Rp50.761.811.934,00 dipergunakan untuk:

1. Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Pengawasan Pemilihan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota
3. Belanja Sewa Kendaraan Operasional
4. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
6. Belanja Sewa Gedung
7. Belanja Barang non Operasional Lainnya
8. Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel

Realisasi Belanja Barang (HDN) sebesar Rp50.761.811.934,00 merupakan belanja netto dari Belanja Barang (HDN) Bruto sebesar Rp50.842.843.286,00 dikurangi pengembalian sebesar Rp81.031.352,00. Pengembalian Belanja Barang (HDN) terdiri atas akun sebagai berikut :

Tabel 26. Rincian Pengembalian Belanja Barang (HDN) TA 2025

No	Kode Akun	Uraian	Jumlah (Rp)
1	521211	Belanja Bahan	34.741.902,00
2	522191	Belanja Jasa Lainnya	40.000.000,00
3	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.089.450,00
4	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.200.000,00
Total			81.031.352,00

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp1.391.834.609,00

Realisasi Belanja Modal periode Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.391.834.609,00 atau 97,21 persen dari anggaran belanja sebesar Rp1.431.806.000,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 27. Anggaran dan realisasi belanja modal 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.343.686.000,00	1.304.334.609,00	97,07
Belanja Modal Lainnya	88.120.000,00	87.500.000,00	99,30
Jumlah Belanja Kotor	1.431.806.000,00	1.391.834.609,00	97,21
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	1.431.806.000,00	1.391.834.609,00	97,21

Realisasi Belanja Modal periode 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.391.834.609,00 dan 1Rp12.934.284.636,00. Realisasi Belanja Modal periode 2025 mengalami kenaikan sebesar persen dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal periode TA 2024, diantaranya disebabkan karena diantaranya disebabkan karena adanya anggaran tambahan di akhir tahun untuk belanja modal peralatan dan mesin berupa belanja kendaraan dan renovasi gedung.

Tabel 28. Perbandingan realisasi belanja modal 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.304.334.609,00	8.121.734.021,00	(83,94)
Belanja Modal Lainnya	87.500.000,00	4.813.050.615,00	(98,18)
Jumlah Belanja Kotor	1.391.834.609,00	12.934.784.636,00	(89,24)
Pengembalian Belanja	0	500.000,00	(100)
Total	1.391.834.609,00	12.934.284.636,00	(89,24)

Realisasi belanja modal sebesar Rp1.391.834.609,00 merupakan realisasi belanja barang yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja modal periode 2025 berdasarkan sumber anggaran tersaji sebagai berikut:

Tabel 29. Belanja modal berdasarkan sumber anggaran 2025

Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Rupiah Murni	0,00	0,00	0,00
Hibah Langsung Dalam Negeri	1.431.806.000,00	1.391.834.609,00	97,21
Total	1.431.806.000,00	1.391.834.609,00	97,21

B.5.1 Belanja Modal (Rupiah Murni)

Belanja Modal RM
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal (Rupiah Murni) periode 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari anggaran belanja sebesar Rp0,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang (Rupiah Murni) periode 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal (RM) 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal (Rupiah Murni) pada periode TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.934.284.636,00 atau mengalami penurunan sebesar 100 persen.

Tabel 31. Perbandingan Belanja Modal (RM) 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	TA 2024 (Rp)	TA 2024 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	8.121.734.021,00	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	0,00	4.813.050.615,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0,00	12.934.784.636,00	(100,00)
Pengembalian Belanja	0,00	500.000,00	(100,00)
Jumlah Pengembalian	0,00	500.000,00	(100,00)
Total	0,00	12.934.284.636,00	(100,00)

B.5.2 Belanja Modal (HDN)

Belanja Modal (HDN)
Rp1.391.834.609,00

Realisasi belanja Modal (hibah dalam negeri) periode Tahun Anggaran 2025 Rp1.391.834.609,00 atau 97,21 persen dari pagu anggaran belanja modal (HDN) sebesar Rp1.431.806.000,00 Pada tahun 2025 Belanja Modal dialokasikan pada Belanja Modal (HDN) berikut :

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Belanja Modal (HDN) TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.304.334.609,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	87.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.391.834.609,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	1.391.834.609,00	0,00	0,00

B.5.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (HDN)

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
(HDN)
Rp1.304.334.609,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (HDN) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.304.334.609,00 dan Rp0,00.

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.304.334.609,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.304.334.609,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	1.304.334.609,00	0,00	0,00

Belanja Peralatan dan Mesin (HDN) sebesar Rp1.304.334.609,00 terdiri dari

Table 34. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin (HDN) Bawaslu Provinsi Jawa Barat TA 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Satuan	Jumlah (Rp)
1	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	8.700.000,00
2	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	Buah	4.310.040,00
3	3050206008	Sound System	1	Buah	8.800.000,00
4	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2	Buah	29.500.000,00
5	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	Buah	17.499.380,00
6	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	40.000.000,00
7	3050206031	Pataka	1	Buah	4.199.996,00
8	3100102001	P.C Unit	7	Buah	123.759.500,00
9	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	1	Buah	11.660.000,00
10	3050201002	Meja Kerja Kayu	18	Buah	94.400.000,00
11	3050201003	Kursi Besi/Metal	10	Buah	31.400.000,00
12	3100203017	External/ Portable Hardisk	2	Buah	2.800.000,00
13	3050105017	Mesin Absensi	2	Buah	5.420.000,00
14	3050206030	Tiang Bendera	1	Buah	7.800.000,00
15	3060102132	Video Conference	2	Buah	25.499.998,00
16	3100102002	Lap Top	28	Buah	573.446.496,00
17	3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	3	Buah	9.900.000,00
18	3050201008	Meja Rapat	3	Buah	70.780.000,00
19	3020104001	Sepeda Motor	3	Unit	85.810.000,00
20	3050204004	A.C. Split	5	Buah	29.999.995,00
21	3050201003	Kursi Besi/Metal	3	Buah	3.237.000,00
22	3060102170	Gimbal Tripod	1	Buah	6.050.000,00
23	3100102002	Lap Top	4	Buah	51.193.200,00
24	3050201005	Sice	6	Buah	27.479.004,00
25	3020104999	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	1	dummy	28.890.000,00
Total			111		1.302.534.609,00

Terdapat perbedaan jumlah nilai pada Realisasi Anggaran belanja peralatan dan mesin Satker Bawaslu Provinsi pada Laporan Realisasi Anggaran yaitu sebesar Rp1.304.334.609,00 sedangkan rincian peralatan dan mesin berjumlah Rp1.302.534.609,00 hal ini disebabkan terdapat kesalahan penganggaran pada akun perlatan dan mesin ekstrakomtable sebesar Rp1.800.000,00 pada saat pengesahan Belanja Hibah disahkan dengan akun

Peralatan dan Mesin yang sebenarnya merupakan belanja barang Ekstrakomtable.

Atas Pembelian Peralatan dan Mesin Satker Bawaslu Provinsi Jawa Barat seluruh nya belum di ajukan PSP.

5.2.1 Belanja Modal Lainnya (HDN)

Belanja Modal Lainnya
(HDN)
Rp87.500.000,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya (HDN) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp87.500.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 35. Perbandingan Belanja Modal Lainnya (HDN) TA 2025

Uraian	Realisasi		% Naik
	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	(Turun)
Belanja Modal Lainnya	87.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	87.500.000,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	87.500.000,00	0,00	0,00

Belanja Modal Lainnya (HDN) sebesar Rp87.500.000,00 merupakan belanja atas renovasi Gedung dan Bangunan Bawaslu Kabupaten Bekasi.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas periode TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp139.672.325.419,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Perbandingan kas lainnya setara kas 2025 dan 2024

No	Keterangan	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	0,00	139.672.325.419,00
Total		0,00	139.672.325.419,00

C.2 Belanja Barang Yang Dibayar di Muka

Belanja Barang yang
Dibayar di Muka
Rp813.225.160,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka Tahun periode TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp813.225.160,00 dan Rp1.638.566.333,00. Belanja Barang Yang Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan Belanja Barang Yang Dibayar di Muka 2025 dan 2024

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	813.225.160,00	1.638.566.333,00
Jumlah	813.225.160,00	1.638.566.333,00

Rekap Belanja Sewa Dibayar Dimuka disajikan dalam Lampiran V. Rekap Belanja Sewa Dibayar Dimuka.

C.3 Persediaan

Persediaan

Rp8.719.500,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Nilai Persediaan periode TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.719.500 dan Rp0,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Adapun rincian persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Perbandingan Persediaan 2025 dan 2024

Persediaan	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Barang Konsumsi	8.719.500,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Total	8.719.500,00	0,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian persediaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian persediaan 2025

No	Kode	Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	816.000,00
2	1010301006	Ordner Dan Map	1.290.000,00
3	1010301010	Alat Perekat	52.000,00
4	1010302001	Kertas HVS	2.956.500,00
5	1010304004	Tinta/Toner Printer	805.000,00
6	1010306010	Batu Baterai	840.000,00
7	1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1.960.000,00
Total			8.719.500,00

Adapun Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 40. Mutasi nilai persediaan 2025

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	25.747.000,00
Perolehan Lainnya	0,00
Mutasi Kurang:	
Habis Pakai	(15.852.525,00)
Koreksi Nilai Kurang	(1.174.975,00)
Saldo per 31 Desember 2025	8.719.500,00

Penjelasan Mutasi Tambah:

Pembelian sebesar Rp25.747.000,00 merupakan pembelian yang terdiri dari:

Tabel 41. Pembelian persediaan 2025 Provinsi Jawa Barat

No	Kode	Nama Barang	Qty	Jumlah (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	16	1.635.000,00
2	1010301006	Ordner Dan Map	6	3.870.000,00
3	1010301010	Alat Perekat	51	3.262.500,00
4	1010301012	Staples	10	575.000,00
5	1010301013	Isi Staples	6	560.000,00
6	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	8	92.000,00
7	1010302001	Kertas HVS	100	6.797.500,00
8	1010304004	Tinta/Toner Printer	12	1.380.000,00
9	1010304010	Mouse	9	2.385.000,00
10	1010306010	Batu Baterai	2	840.000,00
11	1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	235013	4.350.000,00
Total			235.233	25.747.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang:

1. Persediaan Habis Pakai atau Persediaan yang digunakan sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp15.852.525,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 42. Habis Pakai persediaan 2024 Provinsi Jawa Barat

No	Kode	Nama Barang	Qty	Jumlah (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	11	819.000,00
2	1010301006	Ordner Dan Map	4	2.580.000,00
3	1010301010	Alat Perekat	42	3.210.500,00
4	1010301012	Staples	10	575.000,00
5	1010301013	Isi Staples	6	560.000,00
6	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	8	92.000,00

7	1010302001	Kertas HVS	57	3.841.000,00
8	1010304004	Tinta/Toner Printer	5	575.000,00
9	1010304010	Mouse	9	2.385.000,00
10	1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	10	1.215.025,00
Total			162,00	15.852.525,00

2. Koreksi Kuantitas berkurang sebanyak 234.995 unit dengan nilai Rp1.174.975,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan operator persediaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 43. Rincian Koreksi Kuantitas Berkurang

No	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Jumlah (Rp)
1	1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	234995	1.174.975,00
Total			234718	1.174.975,00

Adapun rincian saldo barang persediaan TA 2025 tersaji dalam Lampiran VI. Berita acara stock opname persediaan TA 2025.

C.4 Tanah

Tanah
Rp1.623.808.582,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah Rp1.623.808.582,00 dan Rp1.583.857.000,00. Rincian saldo tanah periode TA 2025 sebesar Rp1.583.857.000,00 terdiri dari:

Tabel 44. Perbandingan Rincian Tanah 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.623.808.582,00	1.583.857.000,00
Total		1.623.808.582,00	1.583.857.000,00

Tabel 45. Saldo Tanah 2025

No	Nama Satker	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
1	Set. Bawaslu Prov. Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	430 m2	1.583.857.000,00
2	Set. Bawaslu Prov. Jawa Barat	Kab. Pangambaran	1566 m2	39.951.582,00
Total				1.623.808.582,00

Adapun Mutasi nilai Aset Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 45. Mutasi nilai Tanah 2025

Saldo per 31 Desember 2024	1.583.857.000,00
Mutasi tambah:	1.583.857.000,00
Hibah Masuk	39.951.582,00,00
Mutasi kurang:	0,00
	0,00
Saldo Tanah 2025	1.623.808.582.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah :

Hibah masuk sebesar Rp39.951.582,00 merupakan Hibah Masuk dari Pemerintah Daerah ke Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan NPHD nomor 028/3051/NPHD/BKAD.4/2025 dan 150/PL.09/JB/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 46. Rincian Hibah Masuk Bawaslu Kab. Pangandaran 2025

No	Nama Satker	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
1	Set. Bawaslu Prov. Jawa Barat	Kab. Pangambaran	1566 m2	39.951.582,00
Total				39.951.582,00

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp28.005.143.163,00

Nilai Perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah Rp28.005.143.163,00 dan Rp29.651.516.020,00. Rincian saldo peralatan dan mesin sebesar

Rp28.005.143.163,00 secara lengkap disajikan pada Lampiran VII.
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin.

Tabel 47. Perbandingan Peralatan dan Mesin 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Peralatan dan mesin	28.005.143.163,00	29.651.516.020,00	(5,56)
Jumlah	28.005.143.163,00	29.651.516.020,00	(5,56)

Nilai mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 48. Mutasi nilai peralatan dan mesin 2025

Saldo per 31 Desember 2024	29.651.516.020,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.409.534.600,00
Hibah Masuk	122.435.000,00
Reklasifikasi Masuk	28.890.000,00
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.972.000,00)
Transfer Keluar	(2.548.670.466,00)
Reklasifikasi Keluar	(28.890.000,00)
Koreksi Pencatatan	(106.999.991,00)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(520.700.000,00)
Saldo periode TA 2025	28.005.143.163,00

Penjelasan Mutasi Tambah:

1. Transaksi Pembelian Peralatan Mesin Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.409.534.600,00 merupakan Belanja Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian Pembelian peralatan mesin 2025 Provinsi Jawa Barat

No	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Jumlah (Rp)
1	3100203003	Printer	1	8.700.000,00
2	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	4.310.040,00
3	3050206008	Sound System	1	8.800.000,00
4	3050105007	Camera Control Television System	3	49.500.000,00
5	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	17.499.380,00
6	3100203004	Scanner	2	40.000.000,00
7	3050206031	Pataka	2	8.399.992,00
8	3100102001	P.C Unit	7	123.759.500,00
9	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	1	11.660.000,00
10	3050201002	Meja Kerja Kayu	18	109.400.000,00
11	3050201003	Kursi Besi/Metal	10	31.400.000,00
12	3100203017	External/ Portable Hardisk	2	2.800.000,00
13	3050105017	Mesin Absensi	2	5.420.000,00

14	3050206030	Tiang Bendera	2	15.600.000,00
15	3060102132	Video Conference	2	25.499.998,00
16	3100102002	Lap Top	28	573.446.496,00
17	3050105057	Pintu Elektrik	3	9.900.000,00
18	3050201008	Meja Rapat	4	100.780.000,00
19	3020104001	Sepeda Motor	3	85.810.000,00
20	3050204004	A.C. Split	10	59.999.990,00
21	3050201003	Kursi Besi/Metal	3	3.237.000,00
22	3060102170	Gimbal Tripod	1	6.050.000,00
23	3100102002	Lap Top	4	51.193.200,00
24	3050201005	Sice	6	27.479.004,00
25	3020104999	Kend. Bermotor Beroda 2 Lainnya	1	28.890.000,00
Total			120	1.409.534.600,00

Terdapat perbedaan Pembelian Peralatan dan Mesin berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.304.334.609,00 sedangkan Pembelian berdasarkan mutasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.409.534.600,00 terdapat selisih sebesar Rp108.799.991,00 hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan belanja Peralatan dan Mesin Bawaslu Kabupaten Sukabumi sebesar Rp1.800.000,00 yang seharusnya belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomtable dan kesalahan pencatatan atas belanja peralatan dan mesin Bawaslu Kabupaten Bekasi sebesar Rp106.999.991,00 penjelasan lebih lanjut atas koreksi Bawaslu Kabupaten Bekasi dijelaskan pada Mutasi Kurang.

- Hibah Masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp122.435.000,00 merupakan Hibah Masuk Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Daerah ke Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Kota Cirebon) dengan Nomor NPHD 000.2.3.2/2380/BAKESBANGPOL/2024 tanggal 18 Oktober 2025 dengan rincian barang sebagai berikut:

Tabel 50. Rincian hibah masuk peralatan mesin 2025 Kota Cirebon

No	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Jumlah (Rp)
1	3050206080	Bracket Standing Peralatan	1	1.915.000,00
2	3050105007	Camera Control Television System	4	4.720.000,00
3	3050201005	Sice	3	29.100.000,00
4	3190102001	Alat Tennis Meja	1	7.000.000,00
5	3050206008	Sound System	1	10.400.000,00
6	3060101036	Microphone/Wireless MIC	2	5.300.000,00
7	3100203003	Printer	1	3.800.000,00

8	3100102002	Lap Top	2	31.000.000,00
9	3100102001	P.C Unit	2	29.200.000,00
Total				122.435.000,00

3. Reklasifikasi masuk peralatan dan mesin sebesar Rp28.890.000,00 merupakan koreksi yang dilakukan dikarenakan kesalahan kode barang ketika penginputan dengan rincian barang sebagai berikut:

Tabel 51. Rincian Reklasifikasi masuk peralatan dan mesin Bawaslu Provinsi Jawa Barat

No	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Jumlah (Rp)
1	3020104001	Sepeda Motor	1	28.890.000,00
Total			1	28.890.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang:

1. Koreksi pencatatan nilai kurang peralatan dan mesin sebesar Rp1.972.000,00 merupakan koreksi dari belanja modal Bawaslu Provinsi Jawa Barat berupa Headset dengan nilai Rp1.972.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 52. Rincian Koreksi Berkurang peralatan dan mesin Jawa Barat

Kode Barang	Nama Barang	Qty	Jumlah (Rp)
3060102118	Head Set	0	1.972.000,00
Total			1.972.000,00

2. Transfer Keluar peralatan dan mesin sebesar Rp2.548.670.466,00 merupakan transfer keluar Peralatan dan Mesin Satker Bawaslu Provinsi Jawa Barat Ke Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 53. Rincian Transfer Keluar dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat

No	Kode Satker	Nama Satker	TA 2025 (Rp)
1	419576	Kabupaten Bandung	92.951.583,00
2	419651	Kabupaten Tasikmalaya	94.466.832,00
3	419779	Kabupaten Bogor	76.662.199,00
4	686135	Kota Bekasi	449.191.094,00
5	686136	Kabupaten Garut	483.472.182,00
6	686137	Kabupaten Bekasi	919.539.076,00
7	686139	Kabupaten Majalengka	432.387.500,00
Total			2.548.670.466,00

Adapun rincian barang yang di lakukan Transfer Keluar dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 54. Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Jumlah (Rp)
1	3050206036	Dispenser	1	3.131.621,00
2	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	18.396.876,00
3	3050204001	Lemari Es	2	9.694.474,00
4	3060102061	Lensa Kamera	1	4.722.917,00
5	3060102128	Camera Digital	2	14.605.116,00
6	3020104001	Sepeda Motor	5	213.529.610,00
7	3060101088	Voice Recorder	3	4.159.100,00
8	3020104001	Sepeda Motor	3	102.813.496,00
9	3050206036	Dispenser	10	32.500.448,00
10	3050105015	Alat Penghancur Kertas	4	12.951.150,00
11	3050201002	Meja Kerja Kayu	36	75.828.000,00
12	3060102132	Video Conference	1	3.700.000,00
13	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	10.380.000,00
14	3050201005	Sice	29	155.781.442,00
15	3050206037	Mimbar/Podium	1	7.700.000,00
16	3050104001	Lemari Besi/Metal	14	35.685.900,00
17	3050204006	Kipas Angin	3	10.500.000,00
18	3050104002	Lemari Kayu	7	8.279.000,00
19	3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	1.380.000,00
20	3060101036	Microphone/Wireless MIC	2	16.820.000,00
21	3050204001	Lemari Es	1	4.847.237,00
22	3050206046	Handy Cam	1	2.500.000,00
23	3050105048	LCD Projector/Infocus	7	67.079.774,00
24	3050206008	Sound System	7	94.958.000,00
25	3060199999	Alat Studio Lainnya	4	25.500.000,00
26	3060102128	Camera Digital	6	39.501.276,00
27	3050206070	Tangga	1	4.000.000,00
28	3050104005	Filing Cabinet Besi	25	75.058.754,00
29	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	103.528.000,00
30	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	107.745.100,00
31	3100203017	External/ Portable Hardisk	5	8.465.000,00
32	3100102001	P.C Unit	44	446.822.000,00
33	3100102002	Lap Top	32	408.791.658,00
34	3050204004	A.C. Split	30	172.820.317,00
35	3050206002	Televisi	7	59.684.750,00
36	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	4	13.776.000,00

37	3050201014	Meja Resepsionis	2	19.000.000,00
38	3050201003	Kursi Besi/Metal	35	85.818.600,00
39	3050201008	Meja Rapat	2	8.999.000,00
40	3050105017	Mesin Absensi	2	5.596.350,00
41	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	5	41.000.000,00
42	3050104007	Brandkas	4	10.619.500,00
Total			398	2.548.670.466,00

Dokumen Transfer Keluar tersaji dalam **Lampiran VIII. Berita Acara TKTm.**

3. Reklasifikasi Keluar milik Satker bawaslu Provinsi Jawa Barat sebesar Rp28.890.000,00 merupakan Reklasifikasi karena kesalahan kode barang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 55. Rincian reklasifikasi Keluar peralatan dan mesin Satker Bawaslu Provinsi Jawa Barat

No	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Jumlah (Rp)
1	3020104001	Sepeda Motor	1	28.890.000,00
Total			1	28.890.000,00

4. Koreksi pencatatan peralatan dan mesin sebesar Rp106.999.991,00 merupakan Koreksi Pencatatan milik Satker Bawaslu Provinsi Jawa Barat dikarenakan adanya kesalahan pencatatan pada Aplikasi SAKTI dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56. Rincian Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Jumlah (Rp)
1	3050206031	Pataka	1	4.199.996,00
2	3050204004	A.C. Split	5	29.999.995,00
3	3050105007	Camera Control Television System	1	20.000.000,00
4	3050201008	Meja Rapat	1	30.000.000,00
5	3050206030	Tiang Bendera	1	7.800.000,00
6	3050201002	Meja Kerja Kayu	1	15.000.000,00
Total			10	106.999.991,00

5. Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp520.700.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya dikarenakan peralatan dan mesin sudah rusak berat.

Rincian Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp520.700.000,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 57. Rincian reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat

No	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Jumlah (Rp)
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	520.700.000,00
Total			2	520.700.000,00

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp255.930.000,00

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah Rp255.930.000,00 dan Rp255.930.000,00. Rincian saldo Gedung dan Bangunan periode TA 2025 sebesar Rp255.930.000,00 terdiri dari:

Tabel 58. Perbandingan Rincian Gedung dan Bangunan 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	TA 2024
1	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	255.930.000,00	255.930.000,00
Total		255.930.000,00	255.930.000,00

Tabel 59. Saldo Gedung dan Bangunan 2025

No	Nama Satker	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
1	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	-	255.930.000,00
Total				255.930.000,00

Adapun Mutasi nilai Aset Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 60. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan 2025

Saldo per 31 Desember 2024	255.930.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Transfer Masuk	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Pemakaian	0,00
Saldo 2025	255.930.000,00

Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp255.930.000,00 merupakan Transaksi Transfer Masuk dari Bawaslu RI ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan bukti Berita Acara Transfer BMN Nomor 57/PL.09/KB/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp9.375.000,00*

Saldo Nilai Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.375.000,00 dan Rp9.375.000,00. Rincian saldo jalan, irigasi dan jaringan tersebut merupakan instalasi lain-lain dengan nilai sebesar Rp9.375.000,00. Sedangkan nilai buku Jaringan pada periode TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 yaitu nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar minus Rp9.375.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 61. Perbandingan Jalan, Irigasi dan Jaringan 2025 dan 2024

No	Kode	Nama	2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	50310	Instalasi Lain	9.375.000,00	9.375.000,00
Total			9.375.000,00	9.375.000,00

Tabel 62. Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan 2025

Kode	Nama	Unit	Jumlah (Rp)
5031001999	Instalasi Lain-lain	1	9.375.000,00
Total		1	9.375.000,00

Tabel 63. Mutasi nilai Jalan, Irigasi, Jaringan 2025

Saldo per 31 Desember 2024	9.375.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo per 2025	9.375.000,00
Akumulasi Penyusutan	- 9.375.000,00
Nilai Buku per 2025	0,00

Saldo Nilai Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp9.375.000,00 merupakan transfer dari Bawaslu RI untuk Pilpres 2014 dalam bentuk Kabel LAN.

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp4.174.420.937,00

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo aset tetap lainnya per TA 2025 dan TA 2024 adalah Rp4.086.920.937 dan Rp4.213.547.418,00.

Tabel 64. Perbandingan aset tetap lainnya 2025 dan 2024

No	Kode	Nama	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
		Aset Tetap Renovasi		
1	60703	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	4.174.420.937,00	4.213.547.418,00
2	60705	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	0,00	0,00
Total			4.174.420.937,00	643.626.677,00

Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 65. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	4.213.547.418,00
Mutasi tambah:	
Renovasi Gedung Bawaslu Kab. Bekasi	87.500.000,00
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	126.626.481,00
Saldo TA 2025	4.174.420.937,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0,00
Nilai Aset Tetap Lainnya 2025	4.174.420.937,00

Penjelasan Mutasi Tambah:

1. Renovasi Gedung Bawaslu Kab. Bekasi sebesar Rp87.500.000 merupakan renovasi atas gedung kantor yang status nya

pinjampakai dan hasil renovasi tersebut belum dilakukan penyerahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Penjelasan Mutasi Kurang:

1. Koreksi sebesar Rp126.626.481,00 merupakan koreksi atas pengembalian belanja modal TAYL yang merupakan temuan BPK atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi Aset Tetap Renovasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Rincian atas koreksi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran IX Surat Koreksi atas Gedung dan Bangunan dalam Renovasi.**

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp18.021.753.545,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode TA 2025 dan TA 2022 adalah masing-masing Rp18.021.753.545,00 dan Rp16.166.980.949,00. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Tabel 66. Perbandingan akumulasi penyusutan aset tetap per 2025 dan 2024

No	Aset Tetap	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(17.957.993.420,00)	(16.109.619.074,00)
2	Gedung dan Bangunan	(54.385.125,00)	(47.986.875,00)
Total		(18.021.753.545,00)	(16.166.980.949,00)

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	1.623.808.582,00	0,00	1.623.808.582,00
2	Peralatan dan Mesin	28.005.143.163,00	(17.957.993.420,00)	10.047.149.743,00
3	Gedung dan Bangunan	255.930.000,00	(54.385.125,00)	201.544.875,00

4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.375.000,00	(9.375.000,00)	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	4.086.920.937,00	0,00	4.086.920.937,00
Total		33.981.177.682,00	(18.021.753.545,00)	15.959.424.137,00

C.10 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) periode TA 2025 dan TA 2024 adalah Rp0,00 dan Rp322.700.642,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 68. Perbandingan aset tak berwujud per 2025 dan 2024

No	Kode	Nama	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
1	8010101001	Software Komputer	0,00	322.700.642,00
Total			0,00	322.700.642,00

Tabel 69. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	322.700.642,00
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0,00
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	(52.627.860,00)
Reklasifikasi Ke Aset lain-lain	(270.072.782,00)
Saldo TA 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0,0
Nilai Aset Tetap Lainnya 2025	0,00

Penjelasan Mutasi Kurang:

1. Mutasi kurang aset tak berwujud sebesar Rp52.627.860,00 merupakan transfer keluar software dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke Satker Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 70. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya 2025

No	Provinsi/ Kab/ Kota	Alamat URL	Nilai (Rp)
1	Kab Bekasi	bekasikab.bawaslu.go.id	10.500.000,00
2	Kab Garut	garutkab.bawaslu.go.id	17.950.000,00
3	Kab Majalengka	majalengkakab.bawaslu.go.id	6.677.860,00
4	Kota Bekasi	bekasikota.bawaslu.go.id	17.500.000,00
Total			52.627.860,00

Adapun BAST TKTM atas Transfer Keluar Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada **Lampiran X BAST KTM TA 2025**.

- Reklasifikasi Aset Tak Berwujud ke Aset lain-lain sebesar Rp270.072.782,00 merupakan reklasifikasi website Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi Aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 71. Rincian Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Ke Aset lain-lain TA 2025

No	Provinsi/ Kab/ Kota	Alamat URL	Nilai (Rp)
1	Provinsi Jawa Barat	jabar.bawaslu.go.id	14.300.000,00
2	Provinsi Jawa Barat	ppid.jabar.bawaslu.go.id	7.500.000,00
3	Provinsi Jawa Barat	pojokcerdas.jabar.bawaslu.go.id	7.500.000,00
4	Kab Bandung Barat	bandungbarat.bawaslu.go.id	18.000.000,00
5	Kab Ciamis	ciamiskab.bawaslu.go.id	9.681.818,00
6	Kab Cirebon	cirebonkab.bawaslu.go.id	8.000.000,00
7	Kab Indramayu	indramayukab.bawaslu.go.id	10.500.000,00
8	Kab Kuningan	kuningankab.bawaslu.go.id	13.636.364,00
9	Kab Pangandaran	pangandarankab.bawaslu.go.id	17.740.000,00
10	Kab Purwakarta	purwakartakab.bawaslu.go.id	18.000.000,00
11	Kab Subang	subangkab.bawaslu.go.id	10.500.000,00
12	Kab Sukabumi	sukabumikab.bawaslu.go.id	7.950.000,00
13	Kab Sumedang	sumedangkab.bawaslu.go.id	10.500.000,00
14	Kota Bandung	bandungkota.bawaslu.go.id	7.500.000,00
15	Kota Banjar	banjarkota.bawaslu.go.id	9.325.600,00
16	Kota Bogor	bogorkota.bawaslu.go.id	17.960.000,00
17	Kota Cimahi	cimahikota.bawaslu.go.id	18.000.000,00
18	Kota Cirebon	cirebonkota.bawaslu.go.id	10.500.000,00
19	Kota Depok	kotadepok.bawaslu.go.id	17.000.000,00
20	Kota Sukabumi	sukabumikota.bawaslu.go.id	18.000.000,00
21	Kota Tasikmalaya	tasikmalayakota.bawaslu.go.id	17.979.000,00
Total			270.072.782,00

C.11 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana yang dibatasi
Penggunaannya
Rp0,00*

Saldo dana yang dibatasi penggunaannya TA 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp2.781.881.744,00. Dana yang dibatasi penggunaannya adalah dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel 72. Mutasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.781.881.744,00
Mutasi tambah:	
	0,00
Mutasi Kurang:	
Jurnal Balik atas RPATA	(2.781.881.744,00)
Saldo TA 2025	0,00

Penjelasan Mutasi Kurang :

Jurnal Balik atas Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp2.781.881.744,00 merupakan jurnal balik atas RPATA Tahun Anggaran 2024 atas dana yang ada di Rekening Penampungan Akhir Tahun yang digunakan untuk penyelesaian pekerjaan Renovasi Gedung Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Tahun 2024 tetapi penyelesaiannya di awal tahun 2025.

C.12 Aset Lain-lain

*Aset lain-lain
Rp455.178.282,00*

Saldo Aset Lain-Lain TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp455.178.282,00 dan Rp436.605.500,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan

telah dihentikan penggunaannya dalam operasional Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Tabel 73. Perbandingan aset lain-lain TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	455.178.282,00	436.605.500,00
Total		455.178.282,00	436.605.500,00

Adapun rincian aset tetap yang tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp455.178.282,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 74. Rincian aset tetap yang tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintah TA 2025

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	3100102002	Lap Top	12	175.105.500,00
2	8010101001	Software Komputer	21	270.072.782,00
Total				445.178.282,00

Tabel 75. Mutasi nilai Aset Lain-Lain 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	436.605.500,00
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	520.700.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset lain-lain	270.072.782,00
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	(782.200.000,00)
Saldo TA 2025	445.178.282,00

Penjelasan Mutasi Tambah :

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain sebesar Rp520.700.000,00 merupakan perubahan status atas Aset Tetap yang sudah rusak berat dan sudah tidak digunakan dalam operasional dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 76. Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke Aset Lain-lain

Kode Barang	Nama Barang	QTY	Jumlah (Rp)
3020102003	Mini Bus	2	520.700.000,00
Total		2	520.700.000,00

2. Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset lain-lain sebesar Rp270.072.782,00 merupakan perubahan status atas Aset tak Berwujud berupa Website yang masa manfaatnya sudah habis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 77. Rincian Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset lain-lain

No	Provinsi/ Kab/ Kota	Alamat URL	Nilai (Rp)
1	Provinsi Jawa Barat	jabar.bawaslu.go.id	14.300.000,00
2	Provinsi Jawa Barat	ppid.jabar.bawaslu.go.id	7.500.000,00
3	Provinsi Jawa Barat	pojokcerdas.jabar.bawaslu.go.id	7.500.000,00
4	Kab Bandung Barat	bandungbarat.bawaslu.go.id	18.000.000,00
5	Kab Ciamis	ciamiskab.bawaslu.go.id	9.681.818,00
6	Kab Cirebon	cirebonkab.bawaslu.go.id	8.000.000,00
7	Kab Indramayu	indramayukab.bawaslu.go.id	10.500.000,00
8	Kab Kuningan	kuningankab.bawaslu.go.id	13.636.364,00
9	Kab Pangandaran	pangandarankab.bawaslu.go.id	17.740.000,00
10	Kab Purwakarta	purwakartakab.bawaslu.go.id	18.000.000,00
11	Kab Subang	subangkab.bawaslu.go.id	10.500.000,00
12	Kab Sukabumi	sukabumikab.bawaslu.go.id	7.950.000,00
13	Kab Sumedang	sumedangkab.bawaslu.go.id	10.500.000,00
14	Kota Bandung	bandungkota.bawaslu.go.id	7.500.000,00
15	Kota Banjar	banjarkota.bawaslu.go.id	9.325.600,00
16	Kota Bogor	bogorkota.bawaslu.go.id	17.960.000,00
17	Kota Cimahi	cimahikota.bawaslu.go.id	18.000.000,00
18	Kota Cirebon	cirebonkota.bawaslu.go.id	10.500.000,00
19	Kota Depok	kotadepok.bawaslu.go.id	17.000.000,00
20	Kota Sukabumi	sukabumikota.bawaslu.go.id	18.000.000,00
21	Kota Tasikmalaya	tasikmalayakota.bawaslu.go.id	17.979.000,00
Total			270.072.782,00

Penjelasan Mutasi Kurang

Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp782.200.000,00 merupakan Penghapusan Aset Lain-Lain yang telah dilakukan lelang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 78. Rincian Aset Lain - Lain yang di Hapuskan

Kode Barang	Nama Barang	QTY	Jumlah
3020102003	Mini Bus	3	782.200.000,00
Total		3	782.200.000,00

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp445.178.282,00

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah Rp445.178.282,00 dan Rp759.306.142,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 79. Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 2025 dan 2024

No	Aset Lainnya	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
A	Aset Tak Berwujud		
1	Software Komputer	0,00	338.413.142,00
Jumlah		0,00	338.413.142,00
B	Aset Lain-Lain		
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	455.178.282,00	436.605.500,00
Jumlah		455.178.282,00	436.605.500,00
Total		445.178.282,00	759.306.142,00

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp37.490.613,00

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga periode TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp37.490.613 dan Rp2.806.220.709,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 80. Perbandingan Utang Pihak Ketiga 2025 dan 2024

Uraian	2024	TA 2023
Utang Pihak Ketiga	37.490.613,00	2.806.220.709,00
Jumlah	37.490.613,00	2.806.220.709,00

Tabel 81. Perbandingan rincian utang kepada pihak ketiga 2025 dan 2024

Akun	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
212111	Belanja Pegawai YMHDB	13.297.904,00	0,00
212112	Belanja Barang YMHDB	24.192.709,00	24.338.965,00
212144	Utang kepada pihak ketiga lainnya	0,00	2.781.881.744,00
Total		37.490.613,00	89.235.118,00

Penjelasan:

1. Belanja Pegawai yang masih harus di bayar sebesar Rp13.297.904,00 berasal dari Kekurangan Tunjangan Fungsional dan Kekurangan Kenaikan Gaji Berkala yang belum dibayarkan per tanggal laporan. Adapun rincian beban pegawai yang masih harus di bayar sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran XI. RINCIAN Belanja Pegawai YMHDB.**
2. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp24.192.709,00 berasal dari Tagihan langganan jasa berupa Listrik, Air, Telepon dan Internet Bulan Desember 2025. Adapun Rincian Belanja Barang yang masih harus dibayar tersaji dalam **Lampiran XII. Belanja Barang Yang Masih Harus Di Bayar 2025.**

C.15 Ekuitas

Ekuitas
Rp16.831.378.184,00

Ekuitas periode TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.831.378.184,00 dan Rp160.833.797.276,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih Entitas yang merupakan selisih antara Aset sebesar Rp16.868.868.797,00 dan kewajiban sebesar Rp37.490.613,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara
Bukan Pajak Rp0,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 Rp27.841.023,00. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 25,09 persen. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	7.528,00	(100,00)
Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	0,00	27.833.495,00	(100,00)
Total	0,00	27.841.023,00	(100,00)

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp50.959.768.834,00

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada periode TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp50.959.768.834 dan Rp33.161.621.843,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 83. Perbandingan rincian beban pegawai TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2025 (Rp)	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.393.935.576,00	1.860.906.800,00	82,38
Beban Pembulatan Gaji PNS	46.899,00	32.430,00	44,62
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	163.231.002,00	119.635.620,00	36,44
Beban Tunj. Anak PNS	39.416.002,00	32.613.914,00	20,86
Beban Tunj. Struktural PNS	272.550.000,00	244.730.000,00	11,37
Beban Tunj. Fungsional PNS	115.830.000,00	97.950.000,00	18,25
Beban Tunj. PPh PNS	311.004.139,00	183.197.872,00	69,76
Beban Tunj. Beras PNS	165.061.280,00	100.518.960,00	64,21
Beban Uang Makan PNS	898.061.000,00	391.597.750,00	129,33

Beban Tunjangan Umum PNS	136.939.244,00	44.584.900,00	207,14
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	17.159.404.395,00	17.338.670.400,00	-1,03
Beban Gaji Pokok PPPK	9.195.031.304,00	3.837.307.800,00	139,62
Beban Pembulatan Gaji PPPK	145.003,00	47.271,00	206,75
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	696.885.630,00	298.519.380,00	133,45
Beban Tunjangan Anak PPPK	191.150.480,00	76.290.464,00	150,56
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	735.350.000,00	386.480.000,00	90,27
Beban Tunjangan Beras PPPK	601.393.785,00	242.389.740,00	148,11
Beban Uang Makan PPPK	1.883.700.100,00	534.583.950,00	252,37
Beban Tunjangan Umum PPPK	284.365.000,00	82.880.000,00	243,10
Beban Uang Lembur	323.904.000,00	297.942.000,00	8,71
Beban Uang Lembur PPPK	582.520.000,00	276.106.000,00	110,98
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4.359.684.577,00	2.770.583.169,00	57,36
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	9.450.159.418,00	3.944.053.423,00	139,61
Total	50.959.768.834,00	33.161.621.843,00	53,67

Terjadi kenaikan Beban Pegawai periode Tahun 2025 sebesar 53,67 persen jika dibandingkan dengan Beban Pegawai periode Tahun 2024 dikarenakan:

1. Penambahan jumlah pegawai berasal dari perekrutan CPNS umum Tahun 2024;
2. Penambahan Tunjangan Struktural dan Tunjangan Fungsional karena adanya Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Penambahan Gaji dan Tunjangan PPPK karena adanya Pelantikan PPPK gelombang II dan gelombang III di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Terdapat perbedaan Jumlah Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Pegawai pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025. Adapun mutasi beban pegawai yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 84. Mutasi beban pegawai 2025

Belanja Pegawai Pada LRA	Rp	50.946.470.930,00
Mutasi Tambah		
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Di Bayar	Rp	13.297.904,00
Mutasi Kurang:		
Jumlah Beban Pegawai TA 2025	Rp	50.959.768.834,00

Penjelasan Mutasi Tambah :

Belanja Pegawai yang masih harus di bayar sebesar Rp13.297.904,00 merupakan Jurnal Penyesuaian yang dilakukan atas Tunggakan Kenaikan Gaji berkala PPPK dan Tunjangan Fungsional, adapun rincian Belanja Pegawai yang masih harus di bayar per satuan kerja dapat dilihat pada **Lampiran XIII Belanja Pegawai Yang Masih Harus Di Bayar TA 2025**.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp15.852.525,00

Jumlah Beban Persediaan untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.852.525,00 dan Rp21.309.181.007,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 85. Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	15.852.525,00	21.309.181.007,00	(99,93)
Beban Persediaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	15.852.525,00	21.309.181.007,00	(99,93)

Terdapat penurunan Beban Persediaan sebesar 99,93 persen atas Beban Persediaan Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024 dikarenakan pada awal tahun 2024 terdapat saldo awal barang persediaan berupa Alat Penanda Identitas PTPS Bawaslu Kabupaten/ Kota. Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang Persediaan dibandingkan jumlah Beban Persediaan, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 86. Mutasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2025

Saldo Awal Persediaan per 1 Januari 2025	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	25.747.000,00
Mutasi Kurang:		
Saldo Persediaan TA 2025	Rp	-8.719.500,00
Koreksi Kuantitas Kurang	Rp	-1.174.975,00
Jumlah Beban Persediaan TA 2025	Rp	15.852.525,00

Penjelasan Mutasi Tambah :

1. Pembelian Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp25.747.000,00 merupakan pembelian persediaan selama Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Penjelasan Mutasi Kurang :

1. Saldo Persediaan sebesar Rp8.719.500,00 merupakan saldo semua jenis persediaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan dalam kondisi baik.
2. Koreksi Kuantitas Kurang sebanyak 234.995 dengan nilai Rp1.174.975,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan Kuantitas dan Harga Satuan.

D.4 Beban Barang dan Jasa*Beban Barang dan**Jasa**Rp42.301.187.377,00*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp42.301.187.377,00 dan Rp593.110.383.292,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 87. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	7.528.522.226,00	17.372.530.867,00	(56,66)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.253.739,00	7.402.679,00	(56,05)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	446.158.000,00	641.616.700,00	(30,46)

Beban Barang Operasional Lainnya	446.360.320,00	1.451.612.169,00	(69,25)
Beban Bahan	3.822.778.449,00	82.852.503.050,00	(95,39)
Beban Honor Output Kegiatan	19.333.111.000,00	370.590.344.000,00	(94,78)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	245.386.784,00	37.658.965.300,00	(99,35)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	23.649.120,00	8.850.000,00	(167,22)
Beban Langganan Listrik	897.207.229,00	2.509.092.985,00	(64,24)
Beban Langganan Telepon	4.665.900,00	33.886.508,00	(86,23)
Beban Langganan Air	49.459.808,00	356.167.953,00	(86,11)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	81.762.063,00	432.144.811,00	(81,08)
Beban Jasa Konsultan	1.246.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa	6.938.847.594,00	57.380.503.846,00	(87,91)
Beban Jasa Profesi	943.294.465,00	19.318.571.545,00	(95,12)
Beban Jasa Lainnya	1.535.484.680,00	2.494.059.790,00	(38,43)
Beban Aset Ekstrakomabel Peralatan dan Mesin	0,00	2.131.089,00	(100,00)
Total	42.301.187.377,00	593.110.383.292,00	(92,87)

Terdapat penurunan Beban Barang dan Jasa TA 2025 sebesar 92,87 persen jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa TA 2024 hal ini disebabkan adanya tahapan Pemilihan Umum yang Berlangsung sampai dengan bulan Februari 2024 dan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang berlangsung sampai dengan bulan November 2024 sedangkan pada Tahun 2025 tidak terdapat tahapan Pemilihan Umum.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang Jasa Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Beban Barang Jasa periode Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari Belanja barang yang masih harus di bayar, Jurnal balik sewa dibayar dimuka tahun anggaran yang lalu dan jurnal balik atas belanja barang tahun anggaran yang lalu. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 88. Mutasi Beban Barang dan Jasa TA 2025

Mutasi Tambah:		
Belanja Barang dan Jasa	Rp	41.474.192.460,00
Belanja Barang dan Jasa yang masih harus dibayar	Rp	24.192.709,00
Jurnal Balik Sewa Di Bayar Di Muka TAYL	Rp	1.638.566.333,00
Kesalahan Pencatatan Ekstrakomptable	Rp	1.800.000,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik atas Belanja Barang TAYL	Rp	(24.338.965,00)
Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025	Rp	(813.225.160,00)
Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2025	Rp	42.301.187.377,00

Penjelasan Mutasi Tambah:

1. Belanja Barang yang masih Harus Di bayar sebesar Rp24.192.709,00 merupakan Jurnal atas tagihan Langganan Listrik, Telepon, Internet dan Air bulan Desember 2025 yang tagihan nya muncul pada bulan Januari 2025, berikut rincian nya :

Tabel 89. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus di Bayar TA 2025

No	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah (Rp)
1	521111	Beban Keperluan Sehari-hari Perkantoran	
2	522111	Beban Langganan Listrik	
3	522112	Beban Telepon	216.450,00
4	522113	Beban Lannganan Air	
Jumlah			24.192.709,00

2. Jurnal Balik Sewa di Bayar Dimuka TAYL sebesar Rp1.638.566.333,00 merupakan jurnal balik atas sewa di bayar dimuka Tahun Anggaran yang Lalu;
3. Kesalahan Pencatatan Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel sebesar Rp1.800.000,00 merupakan kesalan pencatatan belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptable Bawaslu Kota Sukabumi yang dicatat sebagai Belanja Modal Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya kesalahan akun pada saat penganggaran sebesar Rp1.800.000;

Penjelasan Mutasi Kurang

1. Jurnal Balik Belanja Barang TAYL sebesar Rp24.338.965,00 merupakan jurnal balik atas pencatatan pengajuan akrual Beban Barang dan Jasa Yang Masih Harus di Bayar TAYL;
2. Jurnal Prepaid sebesar Rp813.225.160,00 merupakan jurnal pengakuan sewa di Bayar di muka atas sewa Kendaraan Operasional dan Gedung Kantor di Bayar di Muka

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp2.396.357.015,00

Beban Pemeliharaan untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.396.357.015,00 dan Rp5.119.516.598,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Adapun Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 90. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	755.857.935,00	926.695.005,00	(18,44)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.640.499.080,00	4.192.821.593,00	(60,87)
Jumlah	2.396.357.015,00	5.119.516.598,00	(53,19)

Beban Pemeliharaan periode Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 53,19 persen dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan periode Tahun Anggaran 2024 diantaranya disebabkan pada tahun 2025 terdapat pengurangan sewa kendaraan operasional dikarenakan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Pilkada serentak telah selesai

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Beban Pemeliharaan periode Tahun Anggaran 2025

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp27.494.880.922,00

Beban Perjalanan Dinas untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2025 adalah masing-masing sebesar Rp27.494.880.922,00 dan Rp294.862.180.033,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 91. Perbandingan rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.746.229.388,00	23.740.703.572,00	(63,16)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.685.559.545,00	146.682.570.602,00	(98,17)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.370.868.496,00	106.584.075.121,00	(91,21)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.692.223.493,00	17.888.438.738,00	(62,59)
Total	27.494.880.922,00	294.895.788.033,00	(90,68)

Beban perjalan dinas periode Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 90,68 persen dibandingkan dengan Beban perjalanan dinas periode Tahun

Anggaran 2024 hal ini disebabkan adanya Tahapan Pemilu pada Tahun 2024 dan Pelaksanaan Pilkada serentak.

Tidak terdapat perbedaan antara Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional dan Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp3.690.290.372,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.690.209.372 dan Rp3.678.090.584,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 92. Perbandingan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.683.892.122,00	3.669.904.834,00	0,38
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.398.250,00	6.398.250,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan	3.690.290.372,00	3.676.303.084,00	0,38
Beban Amortisasi Software	-	1.787.500,00	-100,00
Jumlah Beban Amortisasi	-	1.787.500,00	-100,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.690.290.372,00	3.678.090.584,00	0,33

D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Operasional
Rp126.858.337.045,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun

Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp126.858.337.045,00 dan Rp951.213.132.334,00.

D.9 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan
Pelepasan Aset Non
Lancar
Rp367.816.000,00

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp367.815.000,00 dan Rp144.142.000,00. Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan penjualan lelang yang berasal dari Lelang Peralatan dan Mesin dengan rincian berikut:

Tabel 93. Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	367.816.000,00	144.142.000,00
Total		367.816.000,00	144.142.000,00

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp367.816.000,00 merupakan hasil lelang Barang Milik Negara berupa barang bergerak dengan Risalah Lelang Nomor 705/08.01/2025-01 sebesar Rp367.816.000,00. Pendapatan hasil Lelang telah disetorkan pada kas negara dengan NTPN 30A052G503GSO50I tanggal 13 November 2025 sebagaimana bukti terlampir pada Lampiran XIV Bukti Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin.

D.10 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset
Non Lancar Rp0,00

Beban Pelepasan Aset Non Lancar periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp108.300.000,00.

D.11 Pendapatan dari kegiatan non Operasional Lainnya

Pendapatan dari
kegiatan non
operasional
Rp212.014.883,00

Pendapatan dari Kegiatan non Operasional lainnya Pos Luar Biasa periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar

Rp212.014.883,00 dan Rp2.140.000.102,00. Rincian dari Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya adalah sebagai berikut:

*Tabel 94. Perbandingan Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya
TA 2025 dan TA 2024*

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	204.270.273,00	201.804.102,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	7.744.610,00	0,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	1.938.196.000,00
Total	212.014.883,00	2.140.000.102,00

1. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp204.270.273,00 merupakan pengembalian atas Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95. Rincian Bukti penerimaan kembali belanja barang TAYL 2025

No	Tanggal	NTPN	Jumlah (Rp)
1	04/02/2025	081D60NA0DGVQBEF	2.643.468,00
2	10/02/2025	4C7F848VVNQO3VGH	60.000,00
3	10/02/2025	43CC755DFID4KOKP	12.035.297,00
4	12/02/2025	BA40F55DFID6OJ06	25.000,00
5	12/02/2025	F520D0NA0DH8NKR6	1.000,00
6	12/02/2025	987946U8F7HVIJHG	73.500,00
7	12/02/2025	0A9872G502M1HK8U	10.000,00
8	21/04/2025	0E7110NA0DNCEMB8	25.000.000,00
9	15/07/2025	88ED31JNG8IJLNQ	267.000,00
10	30/07/2025	CB1992G5035FUET2	6.466.619,00
11	30/07/2025	3E4312G5035FUDFV	11.193.185,00
12	30/07/2025	57D0A48VVOA8ODEJ	14.002.661,00
13	20/11/2025	F00388N3ETHP6LTL	6.956.500,00
14	19/11/2025	7CEED8N3ETHP6JRD	5.593.009,00
15	13/12/2025	D0B820NA0EF2H39B	116.943.034,00
16	19/12/2025	E22780NA0EF84N9S	3.000.000,00
Total			204.270.273,00

2. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp7.744.610,00 merupakan pengembalian atas Pemeriksaan BPK terhadap Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik pada Bawaslu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 dengan NTPN 314810NA0DH7LU1D tanggal 11 Februari 2025.

D.12 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp1.174.975,00*

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.174.975,00 merupakan beban atas koreksi nilai berkurang Head Set Milik Satker Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

D.13 Surplus/Defisit LO

*Defisit LO
Rp126.279.681.137,00*

Surplus/ Defisit LO merupakan hasil dari Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional ditambah dengan Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional. Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 202 sebesar Rp126.279.681.137,00 dan Rp949.037.290.232,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp160.833.797.276,00

Nilai ekuitas periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp160.833.797.276,00 dan Rp249.081.335.774,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp126.279.681.137,00

Jumlah Defisit LO untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp126.279.681.137,00 dan Rp949.037.290.232,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Entitas

Koreksi yang menambah/ mengurangi entitas
Rp90.472.256.473,00

Jumlah koreksi yang mengurangi ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp90.472.256.473,00 dan Rp11.579.766,00.

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Aset Non Revaluasi periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.084.967,00 dan Rp11.579.766,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp16.084.967,00 terdiri dari:

1. Penyusutan Peralatan dan Mesin atas perolehan Hibah Masuk TAYL dari Pemerintah Kota Cirebon ke Bawaslu Kota Cirebon dengan rincian barang sebagai berikut:

Tabel 96. Rincian koreksi nilai aset non revaluasi TA 2025 Provinsi Jawa Barat

Kode Barang	Nama Barang	Qty	Satuan	Jumlah (Rp)
3050206080	Bracket Standing Peralatan	1	Buah	191.500,00
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	4	Buah	472.000,00
3050201005	Sice	3	Buah	2.910.000,00
3190102001	Alat Tennis Meja	1	Buah	1.166.667,00
3050206008	Sound System	1	Buah	1.040.000,00
3060101036	Microphone/Wireless MIC	2	Buah	530.000,00
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	475.000,00
3100102002	Lap Top	2	Buah	3.875.000,00
3100102001	P.C Unit	2	Buah	3.650.000,00
Total		17		14.310.167,00

2. Koreksi pencatatan nilai berkurang peralatan dan mesin sebesar Rp1.774.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Rincian koreksi pencatatan nilai tambah TA 2024 Provinsi Jawa Barat

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	3060102118	Head Set	1.774.800,00
Total			1.774.800,00

E.3.2. Lain-Lain

Nilai Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp90.456.171.506,00 dan minus Rp0,00. Rincian Lain-Lain sebesar Rp90.456.171.506,00 merupakan SP4HL pengembalian sisa Hibah Pilkada yang tidak digunakan ke kas Masing-Masing daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 98. Rincian SP4HL Pengembalian Hibah TA 2025

No	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah (Rp)
1	Kabupaten Sukabumi	280.369.086,00
2	Kabupaten Garut	1.708.205.313,00
3	Kabupaten Ciamis	443.547.010,00
4	Kabupaten Kuningan	12.210.391,00
5	Kabupaten Cirebon	179.845.653,00
6	Kabupaten Majalengka	845.639.811,00

7	Kabupaten Sumedang	11.857.558,00
8	Kabupaten Indramayu	3.240.198.202,00
9	Kabupaten Subang	1.075.233.246,00
10	Kabupaten Purwakarta	1.561.088.709,00
11	Kabupaten Bekasi	1.544.969.249,00
12	Kabupaten Bandung Barat	98.015.960,00
13	Kabupaten Pangandaran	24.637.021,00
14	Kota Bogor	493.023.775,00
15	Kota Sukabumi	531.269.680,00
16	Kota Bandung	4.272.268.687,00
17	Kota Cirebon	222.087.764,00
18	Kota Bekasi	10.190.201.038,00
19	Kota Depok	1.413.899.506,00
20	Kota Cimahi	1.046.805.935,00
21	Kota Tasikmalaya	2.609.158.004,00
22	Kota Banjar	70.155.362,00
23	Provinsi Jawa Barat	58.581.484.546,00
Total		90.456.171.506,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
72.749.518.518,00

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Nilai Transaksi Antar Entitas periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing - masing sebesar Rp72.749.518.518,00 dan Rp860.801.331.500,00. Adapun rincian nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel 99. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2025 dan TA 2024

Transaksi Antar Entitas	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Ditagikan ke Entitas Lain	71.494.805.041,00	466.452.521.368,00
Diterima dari Entitas Lain	(706.457.364,00)	(374.465.327,00)
Transfer Keluar	(1.219.739.723,00)	(10.479.239.371,00)
Transfer Masuk	0,00	207.324.000,00
Pengesahan Hibah Langsung	3.131.921.582,00	404.575.943.200,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(73.446.018,00)	0,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	122.435.000,00	419.247.630,00
Total	72.749.518.518,00	860.801.331.500,00

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Diterima dari Entitas Lain periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp709.457.364,00 merupakan realisasi pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 100. Diterima dari entitas lain (DDEL) TA 2025

Akun	Diterima dari entitas lain	Jumlah (Rp)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	367.816.000,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	204.270.273,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	134.371.091,00
Total		709.457.364,00

Sedangkan Ditagihkan ke Entitas Lain periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp71.494.805.041,00 merupakan realisasi belanja yang bersumber dari Rupiah Murni dengan rincian:

Tabel 101. Ditagihkan ke entitas lain (DKEL) TA 2025

Ditagihkan ke Entitas lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	50.955.301.078,00
Belanja Barang	20.653.779.858,00
Belanja Modal	0,00
Pengembalian Belanja	(114.275.895,00)
Total	71.494.805.041,00

E.4.2 Transfer Keluar

Transfer Keluar
Rp1.219.739.723,00

Transfer Keluar periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.219.739.723,00 merupakan Transfer keluar Barang Milik Negara dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102. Transfer Keluar TA 2025

Deskripsi	Jumlah (Rp)
Transfer Keluar Peralatan dan Mesin	2.548.670.466,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.328.930.743,00)
Transfer Keluar Software	52.627.860,00
Akum. Amortisasi Software	(52.627.860,00)
Total	1.219.739.723,00

1. Transfer keluar peralatan dan mesin sebesar Rp1.219.739.723,00 merupakan transfer keluar Peralatan dan Mesin dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Ke Bawaslu Kabupaten/Kota, nilai transfer keluar merupakan nilai Perolehan sebesar Rp2.548.670.466,00 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.328.930.743,00. Transfer Keluar Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke Satker Penerima adalah sebagai berikut :

Tabel 103. Rekapitulasi Transfer Keluar Peralatan dan Mesin

No	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Nama Akun	Transfer Keluar (Rp)
1	419576	Set Bawaslu Kab. Bandung	Peralatan dan Mesin	92.951.583,00
2	419576	Set Bawaslu Kab. Bandung	Akum. Peny. Peralatan & Mesin	(8.408.696,00)
3	419651	Set Bawaslu Kan. Tasikmalaya	Peralatan dan Mesin	94.466.832,00
4	419651	Set Bawaslu Kan. Tasikmalaya	Akum. Peny. Peralatan & Mesin	(6.747.630,00)
5	419779	Set. Bawaslu Kab. Bogor	Peralatan dan Mesin	76.662.199,00
6	419779	Set. Bawaslu Kab. Bogor	Akum. Peny. Peralatan & Mesin	(5.610.812,00)
7	686135	Set. Bawaslu Kota Bekasi	Peralatan dan Mesin	449.191.094,00
8	686135	Set. Bawaslu Kota Bekasi	Akum. Peny. Peralatan & Mesin	(270.427.896,00)
9	686136	Set. Bawaslu Kab. Garut	Peralatan dan Mesin	483.472.182,00
10	686136	Set. Bawaslu Kab. Garut	Akum. Peny. Peralatan & Mesin	(297.809.122,00)
11	686137	Set. Bawaslu Kab. Bekasi	Peralatan dan Mesin	919.539.076,00
12	686137	Set. Bawaslu Kab. Bekasi	Akum. Peny. Peralatan & Mesin	(468.997.789,00)
13	686139	Set. Bawaslu Kab. Majalengka	Peralatan dan Mesin	432.387.500,00
14	686139	Set. Bawaslu Kab. Majalengka	Akum. Peny. Peralatan & Mesin	(270.928.798,00)
Total				1.219.739.723,00

- a. Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 104. Rincian Barang Transfer Keluar

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	3050206036	Dispenser	1	Buah	3.131.621,00
2	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	18.396.876,00
3	3050204001	Lemari Es	2	Buah	9.694.474,00
4	3060102061	Lensa Kamera	1	Buah	4.722.917,00
5	3060102128	Camera Digital	2	Buah	14.605.116,00
6	3020104001	Sepeda Motor	5	Unit	213.529.610,00
7	3060101088	Voice Recorder	3	Buah	4.159.100,00
8	3020104001	Sepeda Motor	3	Unit	102.813.496,00
9	3050206036	Dispenser	10	Buah	32.500.448,00
10	3050105015	Alat Penghancur Kertas	4	Buah	12.951.150,00
11	3050201002	Meja Kerja Kayu	36	Buah	75.828.000,00
12	3060102132	Video Conference	1	Buah	3.700.000,00
13	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	Buah	10.380.000,00
14	3050201005	Sice	29	Buah	155.781.442,00
15	3050206037	Mimbar/Podium	1	Buah	7.700.000,00
16	3050104001	Lemari Besi/Metal	14	Buah	35.685.900,00
17	3050204006	Kipas Angin	3	Buah	10.500.000,00
18	3050104002	Lemari Kayu	7	Buah	8.279.000,00
19	3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	Buah	1.380.000,00
20	3060101036	Microphone/Wireless MIC	2	Buah	16.820.000,00
21	3050204001	Lemari Es	1	Buah	4.847.237,00
22	3050206046	Handy Cam	1	Buah	2.500.000,00
23	3050105048	LCD Projector/Infocus	7	Buah	67.079.774,00
24	3050206008	Sound System	7	Buah	94.958.000,00
25	3060199999	Alat Studio Lainnya	4	dummy	25.500.000,00
26	3060102128	Camera Digital	6	Buah	39.501.276,00
27	3050206070	Tangga	1	Buah	4.000.000,00
28	3050104005	Filing Cabinet Besi	25	Buah	75.058.754,00
29	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	Buah	103.528.000,00
30	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	Buah	107.745.100,00
31	3100203017	External/ Portable Hardisk	5	Buah	8.465.000,00
32	3100102001	P.C Unit	44	Buah	446.822.000,00
33	3100102002	Lap Top	32	Buah	408.791.658,00
34	3050204004	A.C. Split	30	Buah	172.820.317,00
35	3050206002	Televisi	7	Buah	59.684.750,00
36	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	4	dummy	13.776.000,00
37	3050201014	Meja Resepsionis	2	Buah	19.000.000,00
38	3050201003	Kursi Besi/Metal	35	Buah	85.818.600,00
39	3050201008	Meja Rapat	2	Buah	8.999.000,00
40	3050105017	Mesin Absensi	2	Buah	5.596.350,00
41	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	5	Buah	41.000.000,00
42	3050104007	Brandkas	4	Buah	10.619.500,00
Total					2.548.670.466,00

- b. Akumulasi Penyusutan dari Transfer Masuk Peralatan dan Mesin Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.328.930.743,00.
2. Transfer Keluar Software sebesar Rp0,00 merupakan Transfer Keluar Software dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke Satker Bawaslu Kabupaten/Kota, nilai transfer keluar merupakan nilai Perolehan sebesar Rp52.627.860,00 dengan nilai akumulasi Amortisasi Software sebesar Rp52.627.860,00. Transfer Keluar Software Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke Satker Penerima adalah sebagai berikut :

Tabel 105. Rekapitulasi Transfer Keluar Software

No	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Nama Akun	Transfer Keluar
1	686135	Set. Bawaslu Kota Bekasi	Software	17.500.000,00
2	686135	Set. Bawaslu Kota Bekasi	Akum. Amor. Software	(17.500.000,00)
3	686136	Set. Bawaslu Kab. Garut	Software	17.950.000,00
4	686136	Set. Bawaslu Kab. Garut	Akum. Amor. Software	(17.950.000,00)
5	686137	Set. Bawaslu Kab. Bekasi	Software	17.950.000,00
6	686137	Set. Bawaslu Kab. Bekasi	Akum. Amor. Software	(17.950.000,00)
7	686139	Set. Bawaslu Kab. Majalengka	Software	6.677.860,00
8	686139	Set. Bawaslu Kab. Majalengka	Akum. Amor. Software	(6.677.860,00)
Total				0,00

- a. Rincian Transfer Keluar Software Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 106. Rincian Transfer Keluar Software

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	8010101001	Software Komputer	4	dummy	52.627.860,00
Total					52.627.860,00

- b. Transfer Keluar Akumulasi Amortisasi Software Bawaslu Provinsi Jawa barat sebesar Rp52.627.860,00.

E.4.3 Transfer Masuk

Transfer Masuk
Rp0,00

Transfer Masuk periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp3.131.921.582,00

Pengesahan Hibah Langsung periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.131.921.582,00 merupakan Hibah Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam bentuk uang dan Tanah yang sudah disahkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Rincian Pengesahan Hibah Langsung adalah sebagai berikut :

Tabel 107. Pengesahan Hibah Langsung TA 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Register	NPHD
Hibah Uang				
1	Bawaslu Kota Depok	350.000.000,00	2YPD4NKA	978/911/Bakesbangpol/2025 028/KU.00.01/JB-25/9/2025
2	Bawaslu Kota Sukabumi	50.000.000,00	2FZAM1VA	KB.04.05/001/188.45/011/BAKESBANGPOL/NPHD/2025 114/KU/JB-26/11/2025
3	Bawaslu Kabupaten Bekasi	900.000.000,00	2K5PMN4A	200.1.5.1/1551/NPHD/Bakesbangpol/2025 144/KU/JB/07/2025
4	Bawaslu Kabupaten Indramayu	200.000.000,00	2LT34UDA	200.1.5/715/Poldagri/2025 237/HK.00.01/JB-09/11/25
5	Bawaslu Kabupaten Majalengka	342.000.000,00	2FBVBE4A	200.1.5.4/286/Bakesbangpol/2025 21/PR.03.00/K.JB-24/11/2025
6	Bawaslu Kabupaten Sukabumi	200.000.000,00	2QGDPBQA	900.1.13.5/PJ-13/BAKESBANGPOL/2025
7	Bawaslu Kabupaten Sumedang	150.000.000,00	2VZ6Z2WA	B/858/000.4.3.2/X/2025 010/HK.02/JB-17/10/2025
8	Bawaslu Kota Bogor	899.970.000,00	2WS3819A	460/NPHD.02-POLDAGRI/BAKESBANGPOL/2025 018/HK.02/JB-22/07/2025
Jumlah Hibah Uang		3.091.970.000,00		
Hibah Tanah				
1	Bawaslu Kab. Pangandaran	39.951.582,00	29JJ7KDA	028/3051/NPHD/BKAD.4/2025 150/PL.09/JB/12/2025
Jumlah Hibah Tanah		39.951.582,00		
Total		3.131.921.582,00		

Adapun Rincian Penerimaan Hibah Langsung dapat dilihat pada Lampiran XV Rincian Hibah Bawaslu Langsung Tahun Anggaran 2025.

E.4.5 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan
Pengembalian Hibah
Langsung
(Rp73.446.018,00)

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per 31 Desember 2025 sebesar minus Rp73.446.018,00 merupakan pengesahan atas setoran sisa hibah ke donor/pemberi hibah pada Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 108. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Register	NPHD
1	Bawaslu Kota Depok	17.406.772,00	2YPD4NKA	978/911/Bakesbangpol/2025 028/KU.00.01/JB-25/9/2025
2	Bawaslu Kota Sukabumi	270.000,00	2FZAM1VA	KB.04.05/001/188.45/011/BAKESBANGPOL/NPHD/2025 114/KU/JB-26/11/2025
3	Bawaslu Kabupaten Bekasi	4.811.533,00	2K5PMN4A	200.1.5.1/1551/NPHD/Bakesbangpol/2025 144/KU/JB/07/2025
4	Bawaslu Kabupaten Indramayu	15.080.000,00	2LT34UDA	200.1.5/715/Poldagri/2025 237/HK.00.01/JB-09/11/25
5	Bawaslu Kabupaten Majalengka	25.580.000,00	2FBVBE4A	200.1.5.4/286/Bakesbangpol/2025 21/PR.03.00/K.JB-24/11/2025
6	Bawaslu Kabupaten Sukabumi	80.013,00	2QGDPBQA	900.1.13.5/PJ-13/BAKESBANGPOL/2025
7	Bawaslu Kabupaten Sumedang	594.000,00	2VZ6Z2WA	B/858/000.4.3.2/X/2025 010/HK.02/JB-17/10/2025
8	Bawaslu Kota Bogor	9.623.700,00	2WS3819A	460/NPHD.02-POLDAGRI/BAKESBANGPOL/2025 018/HK.02/JB-22/07/2025
Jumlah Hibah Uang		73.446.018,00		

E.4.6 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan
Pengembalian Hibah
Langsung TAYL
Rp122.435.000,00

Pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp122.435.000,00 merupakan Penerimaan Hibah Peralatan Mesin Bawaslu Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024 dari Pemerintah Kota Cirebon dengan Nomor NPHD 000.2.3.2/2380/BAKESBANGPOL/2024 dan 71/PL.04/K.JB-24/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan BAST Nomor 000.2.3.2/35/BAKESBANGPOL/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan nomor register 2AA8A8SA.

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Penurunan Ekuitas
Rp144.002.419.092,00

Penurunan Ekuitas periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp144.002.419.092,00 dan Rp88.247.538.498,00. Penurunan Ekuitas diperoleh dari jumlah Defisit

LO ditambah dengan nilai Koreksi Lain-Lain dan nilai Transaksi Antar Entitas.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp16.831.378.184,00

Nilai Ekuitas Akhir periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.831.378.184,00 dan Rp160.833.797.276,00. Nilai Ekuitas Akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp160.833.797.276,00 dikurangi dengan nilai Penurunan Ekuitas sebesar Rp144.089.919.092,00.

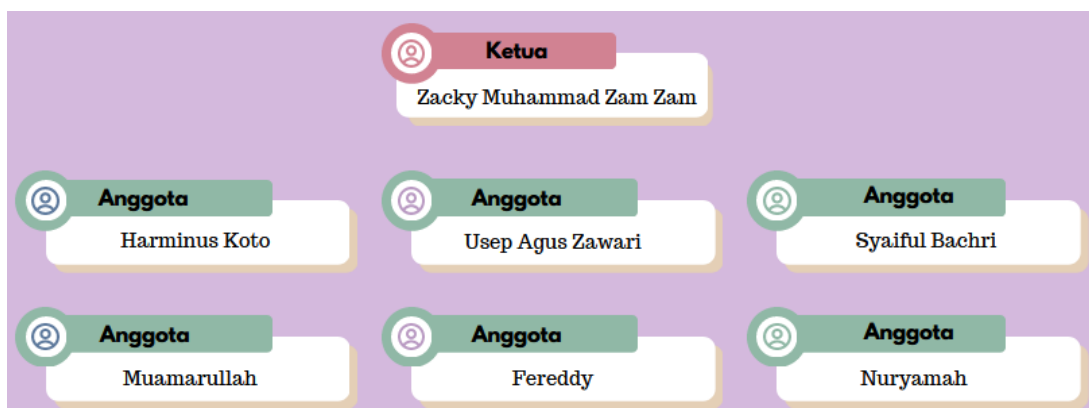
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 SOTK BARU

A. Bagan Struktur Organisasi Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki 7 (tujuh) orang komisioner. Berikut ini adalah struktur organisasi Pimpinan/Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Struktur Organisasi Ketua Bawaslu Provinsi Kelas A

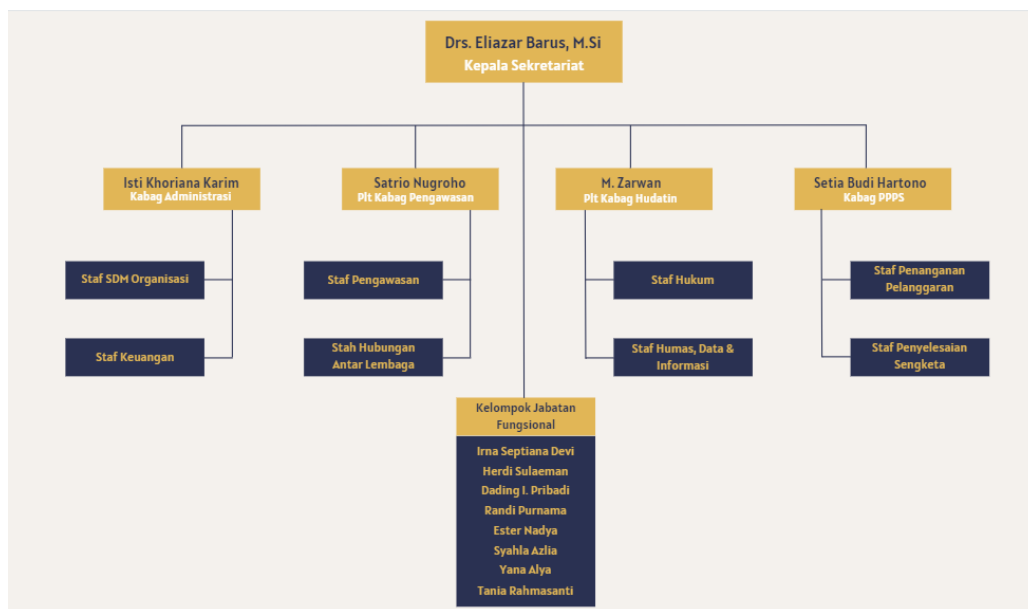


B. Bagan Struktur Organisasi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. maka Sekretariat Bawaslu Provinsi

Jawa Barat termasuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A. Berikut ini adalah struktur organisasi untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A.

Struktur Organisasi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A



Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kepala Sekretariat membawahi 4 (empat) Bagian yaitu:

- Bagian Administrasi;
- Bagian Pengawasan Pemilu;
- Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- Bagian Hukum. Hubungan Masyarakat. Data. dan Informasi; dan kelompok jabatan fungsional.

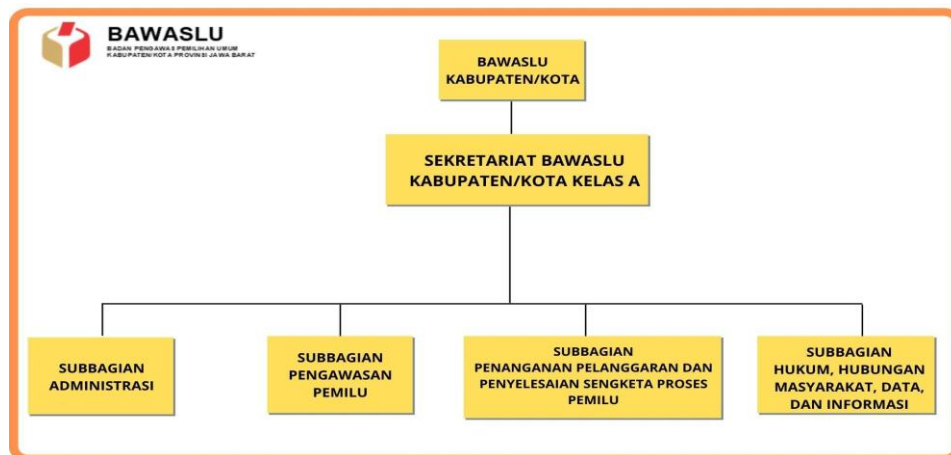
Bawaslu Provinsi Jawa Barat mempunyai 8 Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

- a. Analis Pengelola APBN Ahli Muda
- b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
- c. Analis Kebijakan Ahli Muda
- d. Analis Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
- e. Analis Hukum Ahli Muda
- f. Penata Laksana Barang Terampil
- g. Pranata Pengelolaan Keuangan APBN
- h. Pranata Humas

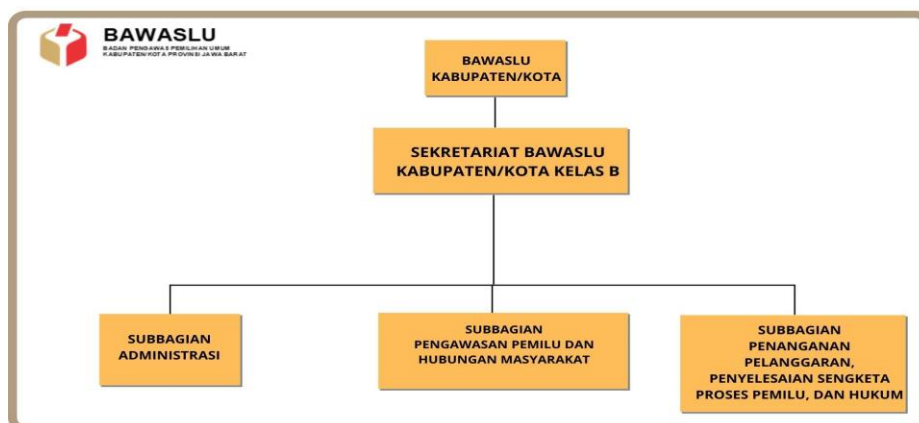
C. Bagan Struktur Organisasi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. maka 27 (dua puluh tujuh) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi kelas A dan kelas B. Berikut ini adalah struktur organisasi untuk Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas A dan Kelas B.

Struktur Organisasi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A



Struktur Organisasi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B



Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau Koordinator Sekretariat. Sebanyak 18 (delapan belas) Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya masih belum berstatus Satuan Kerja dan dipimpin oleh Kepala/ Koordinator Sekretariat.

F.2 REKENING

Sehubungan dengan tahapan Restrukturisasi Rekening Pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Rekening Pengeluaran adalah rekening pemerintah dalam bentuk giro pemerintah atau rekening virtual pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara atau untuk membayar pengeluaran negara.

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 52 rekening, yang terdiri dari:

1. Rekening Rupiah Murni Satker Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sejumlah 23 rekening.

Tabel 109. Rekening Rupiah Murni Satker Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Ket
1.	'8100126863071000	BPG 095 BAWASLU PROV JABAR	Aktif
2.	'8100126863071001	BPP 095 BAWASLU SUBAG ADM	Aktif
3.	'8100126863071002	BPP 095 BAWASLU SUBAG PENGAWASAN	Aktif
4.	'8100126863071003	BPP 095 BAWASLU SUBAG HHDI	Aktif
5.	'8100126863071004	BPP 095 BAWASLU SENGKETA	Aktif
6.	'8100126863071006	BPP 095 BAWASLU KB SUKBUMI	Aktif
7.	'8100126863071011	BPP 095 BAWASLU KB CIAMIS	Aktif
8.	'8100126863071012	BPP 095 BAWASLU KB KUNINGAN	Aktif
9.	'8100126863071013	BPP 095 BAWASLU KB CIREBON	Aktif
10.	'8100126863071015	BPP 095 BAWASLU KB SUMEDANG	Aktif
11.	'8100126863071016	BPP 095 BAWASLU KB INDRAMAYU	Aktif
12.	'8100126863071017	BPP 095 BAWASLU KB SUBANG	Aktif
13.	'8100126863071018	BPP 095 BAWASLU KB PURWAKARTA	Aktif
14.	'8100126863071021	BPP 095 BAWASLU KB BDG BRT	Aktif
15.	'8100126863071022	BPP 095 BAWASLU KB PANGANDARAN	Aktif
16.	'8100126863071023	BPP 095 BAWASLU KT BOGOR	Aktif
17.	'8100126863071024	BPP 095 BAWASLU KT SUKBUMI	Aktif
18.	'8100126863071025	BPP 095 BAWASLU KT BANDUNG	Aktif
19.	'8100126863071026	BPP 095 BAWASLU KT CIREBON	Aktif
20.	'8100126863071028	BPP 095 BAWASLU KT DEPOK	Aktif
21.	'8100126863071029	BPP 095 BAWASLU KT CIMAHI	Aktif
22.	'8100126863071030	BPP 095 BAWASLU KT TASIK	Aktif
23.	'8100126863071031	BPP 095 BAWASLU KT BANJAR	Aktif

F.3 PEJABAT PERBENDAHARAAN

Pejabat Perbendaharaan di Sekretariat Bawaslu Jawa Barat termasuk 18 Kabupaten/Kota yang statusnya belum menjadi Satuan Kerja sehingga masih menginduk Ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Tabel 110. Pejabat Perbendaharaan TA 2025

NO	PROVINSI/ KAB/KOTA	NAMA	JABATAN
1	Provinsi Jawa Barat	Widodo Wuryanto	KPA
		Muhamad Zarwan	PPK Bagian Administrasi
		Isti	PPK Bagian HHDI
		Nurul Paramita	PPK Bagian PPPS
		Rahmat Parlindungan	PPK Bagian Pengawasan
		Herdi Sulaeman	PPSPM
		Kiki Mulyana	BP
		Dian Lestari	BPP Bagian Administrasi
		Herlina	BPP Bagian Pengawasan
		Riska Rindhiantika	BPP Bagian PPPS
		Syahla Azlia	BPP Bagian HHDI
2	Kota Bandung	Rizal Fadilah M	PPK
		Deni Purnama	BPP
3	Kota Cimahi	Seta Dewa Nugroho	PPK
		Sundari Eka Agustina	BPP
4	Kota Tasikmalaya	Hadi Kresnadianto	PPK
		Aceng Fathurrohman	BPP
5	Kota Banjar	Asep Sutanto	PPK
		Irpan Maulana	BPP
6	Kota Sukabumi	Hery Hendramawan H	PPK
		Rahmayanti Putri D	BPP
7	Kota Bogor	Yulvi Aditya Kusnadi	PPK
		Mohammad Arsyad S	BPP
8	Kota Depok	Yulianingsih	PPK
		Sulistyo Hanggari	BPP
9	Kota Cirebon	Dody Saleh Wahyudin	PPK
		Rina Windasari Turnip	BPP
10	Kabupaten Bandung Barat	Ria Anjani	PPK
		Ade Mulyana	BPP
11	Kabupaten Subang	Dading Isdyan Pribadi	PPK
		Junuhastuty Minggu	BPP
12	Kabupaten Purwakarta	Cepi Saprudin	PPK
		Khoriyah	BPP

13	Kabupaten Sukabumi	Anzar Kusnandar	PPK
		Yudi Nurhadi	BPP
14	Kabupaten Ciamis	Fadhila Fitriyadi	PPK
		Sri Wachyu W	BPP
15	Kabupaten Pangandaran	Karsim	PPK
		Ariani Widiastuti	BPP
16	Kabupaten Sumedang	Irna Septiana Devi	PPK
		Ganda Wigena	BPP
17	Kabupaten Kuningan	Nana Rukmana	PPK
		Ari Sutrisno	BPP
18	Kabupaten Cirebon	Ayip Saduloh	PPK
		Darsan	BPP
19	Kabupaten Indramayu	Satrio Nugroho	PPK
		Lintang Arafah	BPP

F.4 LOKASI DAN STATUS KANTOR

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat menempati gedung di Kompleks Gedung KORPRI Jalan Turangga Nomor 25 Kota Bandung dengan status pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 032/Kep.257-BPKAD/2024 Tentang Pinjam Pakai Tanah Milik/ Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Turangga Nomor 25 Daerah Kota Bandung untuk digunakan Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat.

F.5 TINDAK LANJUT BPK dan APIP

Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK, BPK Perwakilan dan APIP terhadap Sekretariat Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025 dan Tindak lanjut atas hasil audit operasional Inspektorat Wilayah disajikan dalam **Lampiran XVI. Tindak Lanjut BPK dan APIP.**

F.6 HASIL PENILAIAN PIPK

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas. Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi. dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Berdasarkan penilaian tersebut. kami menyimpulkan bahwa. pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif sebagaimana terlampir pada **Lampiran XVII. Laporan Akhir PIPK 2025.**

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran
2. Kas lainnya dari Hibah
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Peralatan dan Mesin

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

Tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah (Jika Tidak ada temuan).

F.7 Laporan Kinerja

Secara lengkap anggaran dan realisasi kegiatan beserta capaian output Bawaslu Provinsi Jawa Barat Program Prioritas Nasional disajikan pada **Lampiran XVIII Laporan Capaian Output.**

F.8 Pengungkapan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional VII-Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 2 (dua) Kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 (satu) Satuan kerja dengan Pagu Mencapai Rp432.890.000,00 dan realisasi sebesar Rp398.762.720,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111. Rincian Kegiatan Prioritas Nasioan Tahun Anggaran 2025

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	146.880.000,00	127.867.949,00	87,06	Lembaga	1	1	100
Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	286.010.000,00	270.894.771,00	94,72	Laporan	23	23	100
Total	432.890.000,00	398.762.720,00	92,12		24	24	100